KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

APBN KITA

KINERJA & FAKTA

Kinerja Solid APBN Kuartal I, Menjaga Ekspektasi Pertumbuhan Ekonomi

APRIL 2023

Foto: Storypost - Muhammad Safei

Scan dan Unduh
APBN KITA

foto: istock

“APBN menjadi instrumen yang sangat penting untuk menjaga kesejahteraan rakyat dan mendorong perekonomian kita untuk bertransformasi menciptakan nilai tambah, produktivitas, serta kinerja yang baik.

Selamat Menunaikan ibadah puasa Ramadhan 1444 Hijriah.”

Menteri Keuangan,
Sri Mulyani Indrawati

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	7
Perkembangan Ekonomi Makro	15
Postur APBN	19
Laporan Khusus	22
Penerimaan Pajak	47
Penerimaan Bea dan Cukai	55
Penerimaan Negara Bukan Pajak	61
Belanja Pemerintah Pusat	67
Transfer ke Daerah	75
Pembiayaan Utang	81

Diterbitkan oleh: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pelindung: Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan. **Pengarah:** Pimpinan Unit Eselon I Kemenkeu**Penanggung Jawab:** Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Sekretaris Komite *Asset-Liability Committee* Kementerian Keuangan. **Pemimpin Redaksi:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. **Dewan Redaksi:** Tim *Deputies Asset-Liability Committee* Kementerian Keuangan. **Tim Redaksi:** Tim Teknis *Asset-Liability Committee* Kementerian Keuangan, Tim Redaksi Penyusun Publikasi APBN KiTa. **Editor:** Tim Editor Penyusun Publikasi APBN KiTa **Desain Grafis, Layout dan Foto:** Biro KLI Kementerian Keuangan. **Alamat Redaksi:** Gedung Frans Seda Lantai 8, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta.

www.kemenkeu.go.id/apbnkita

Pendapatan Negara sebesar Rp647,15 triliun atau 26,27 persen dari Target dan tumbuh 28,98 persen (*yoy*).

Realisasi tersebut terdiri atas Penerimaan Pajak sebesar Rp432,25 triliun (25,16 persen dari Target), tumbuh 33,78 persen (*yoy*), serta Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp72,24 triliun (23,83 persen dari Target).

Penerimaan Negara Bukan Pajak telah mencapai Rp142,66 triliun (32,32 persen dari Target), tumbuh 43,75 persen (*yoy*).

Penerimaan Hibah sebesar Rp13,67 miliar, lebih rendah dari realisasi periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp108,41 miliar.

Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp347,27 triliun atau 15,46 persen dari Pagu, tumbuh 10,52 persen (*yoy*), yang terdiri atas realisasi Belanja K/L sebesar Rp166,93 triliun (16,68 persen dari Pagu), tumbuh 11,30 pesen (*yoy*), dan realisasi Belanja Non-K/L yang mencapai Rp180,34 triliun (14,48 persen dari Pagu) atau meningkat 9,81 persen (*yoy*).

Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp171,39 triliun (21,04 persen dari Pagu), sedikit lebih rendah 2,88 persen (*yoy*).

Ringkasan Eksekutif

Prospek ekonomi global sedikit melemah yang tercermin dari kontraksi aktivitas manufaktur global pada Maret 2023. Kontraksi aktivitas manufaktur global terutama didorong oleh kontraksi di negara Amerika Serikat dan kawasan Eropa. Sementara itu, perkembangan harga komoditas global seperti gas dan batubara menunjukkan tren menurun, namun harga minyak dan komoditas pangan masih bergerak *volatile*. Tingkat inflasi global cenderung meningkat dan masih akan berpotensi kuat mendorong peningkatan suku bunga di negara maju. Perkembangan aktivitas ekonomi nasional masih *resilient* dan kinerja APBN juga masih terus positif hingga Maret 2023. Penguatan pemulihan ekonomi nasional akan terus berlangsung di tengah ketidakpastian perkembangan ekonomi global.

Pada Maret 2023, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tercatat Rp647,15 triliun atau 26,27 persen dari Target APBN 2023[1]. Capaian

1. Persentase terhadap Target dan Pagu mengacu pada APBN 2023

tersebut lebih tinggi Rp145,39 triliun (*yoy*), melanjutkan tren kinerja positif yang terjadi pada awal tahun 2023.
Dari sisi pertumbuhannya, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tumbuh 28,98 persen (*yoy*). Secara nominal, realisasi komponen penerimaan yang bersumber dari Perpajakan mencapai Rp504,48 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp142,66 triliun, dan realisasi hibah mencapai Rp13,70 miliar. Berdasarkan pertumbuhannya, realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBP tumbuh berturut-turut sebesar 25,36 persen (*yoy*) dan 43,75 persen (*yoy*), sedangkan capaian masing-masing komponen Pendapatan Negara (perpajakan dan PNBP) terhadap Target berturut-turut 24,95 persen dan 32,32 persen.

Capaian Penerimaan Perpajakan bersumber dari Penerimaan Pajak serta Kepabeanan dan Cukai.
Dari sisi Penerimaan Pajak, hingga akhir Maret 2023 capaiannya tercatat sebesar Rp432,25 triliun atau 25,16 persen terhadap APBN 2023.
Penerimaan Pajak tersebut tumbuh 33,78 persen (*yoy*). Secara nominal, Penerimaan Pajak utamanya berasal dari Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) non-migas dan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM). Lebih detilnya, capaian PPh non-migas secara nominal ditopang oleh penerimaan dari subkomponen PPh Pasal 21, PPh Pasal 25/29 Badan, dan PPh Final. Berdasarkan pertumbuhannya, PPh non-migas tumbuh 31,03 persen (*yoy*) dengan didukung utamanya oleh pertumbuhan subkomponen dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 25/29 Badan, dan PPh Final yang berturut-turut tumbuh 21,64 persen (*yoy*), 69,57 persen (*yoy*), dan 0,98 persen (*yoy*). Komponen Penerimaan Pajak yang lain juga menunjukkan kinerja positif, seperti PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 26, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 22. Pertumbuhan subkomponen utama Penerimaan PPh non-migas menunjukkan berlanjutnya pemulihan ekonomi hingga Maret 2023. Lebih lanjut, realisasi Penerimaan Pajak dari komponen Penerimaan PPN/PPnBM secara nominal ditopang utamanya oleh Penerimaan PPN, khususnya PPN Dalam Negeri (PPN DN) dan PPN Impor. Secara kumulatif PPN/PPnBM tumbuh cukup signifikan sebesar 42,37 persen (*yoy*). Pertumbuhan komponen Penerimaan PPN DN didorong oleh aktivitas ekonomi yang kembali normal dan konsumsi masyarakat yang terus meningkat serta kebijakan tarif 11 persen

yang pada Maret 2022 belum berlaku. Selain itu, seiring konsumsi dalam negeri yang terus membaik mendorong kegiatan impor yang meningkat sehingga kinerja PPN Impor positif.

Penerimaan Perpajakan yang bersumber dari Kepabeanan dan Cukai, hingga akhir Maret 2023 terealisasi Rp72,24 triliun atau 23,83 persen terhadap Target dan terkontraksi 8,93 persen (*yoy*). Secara nominal, Penerimaan Kepabeanan dan Cukai utamanya didukung oleh penerimaan dari cukai, khususnya Cukai Hasil Tembakau (CHT). Kinerja Penerimaan Kepabeanan dan Cukai berdasarkan pertumbuhan penerimaannya tercatat positif pada komponennya Bea Masuk (BM), tumbuh 8,84 persen (*yoy*), sedangkan komponen Cukai dan Bea Keluar (BK) terkontraksi masing-masing sebesar 0,72 persen dan 71,66 persen (*yoy*). Capaian Penerimaan Kepabeanan dan Cukai didorong oleh masih meningkatnya aktivitas impor di awal tahun 2022. Lebih lanjut, pertumbuhan komponen penerimaan pajak perdagangan internasional yang berasal dari BM kinerjanya didorong oleh kinerja impor nasional terutama sektor perdagangan besar yang terus meningkat seiring pemulihan ekonomi serta kenaikan kurs. Penerimaan komponen BK mengalami penurunan akibat turunnya volume ekspor komoditas mineral dan harga *Crude Palm Oil* (CPO) yang lebih rendah.

Realisasi PNBP sampai dengan akhir Maret 2023 mencapai Rp142,66 triliun (32,32 persen terhadap Target) atau tumbuh positif 43,75 persen (*yoy*). Peningkatan capaian realisasi tersebut bersumber dari realisasi PNBP Sumber Daya Alam (SDA), PNBP Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), PNBP Lainnya, dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Secara lebih rinci, realisasi PNBP SDA mencapai Rp75,56 triliun atau tumbuh positif 58,62 persen (*yoy*). Tumbuh positifnya PNBP SDA utamanya didorong oleh kenaikan harga komoditas minerba, terutama batubara dan nikel.

Sejalan dengan PNBP SDA, PNBP KND juga mengalami tren positif dengan capaian sebesar Rp4,60 triliun. Capaian positif PNBP KND didorong oleh kenaikan setoran dividen interim salah satu Bank Himbara.

Realisasi PNBP Lainnya hingga akhir Maret 2023 mencapai Rp44,31 triliun atau tumbuh positif sebesar 30,21 persen

(*yoy*). Meningkatnya capaian PNBP Lainnya disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dari Penjualan Hasil Tambang (PHT), pendapatan dari PNBP Layanan Kementerian/ Lembaga (K/L) seperti pendapatan hasil lelang tipikor (Kejaksaan), pendapatan pelayanan administrasi hukum (KemenkumHAM), dan pendapatan penggunaan spektrum frekuensi radio (Kemenkominfo).

Sama seperti tiga komponen lainnya, PNBP yang berasal dari BLU juga mengalami tren positif dengan capaian realisasi sebesar Rp18,19 triliun atau tumbuh 4,35 persen (*yoy*). Pertumbuhan positif pada pendapatan BLU disebabkan oleh meningkatnya pendapatan jasa pelayanan Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Maret 2023 mencapai Rp518,66 triliun (16,94 persen dari Pagu), sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 15,79 persen. Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp347,23 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp171,39 triliun. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan 31 Maret 2023 tumbuh sebesar 10,52 persen (*yoy*). Lebih tingginya realisasi Belanja Pemerintah Pusat periode Maret 2023 terutama dipengaruhi realisasi Belanja Barang mencapai Rp58,19 triliun (tumbuh 36,43 persen, *yoy*) dan Belanja Modal yang mencapai Rp23,47 triliun (tumbuh 25,30 persen, *yoy*). Selain itu, kinerja penyaluran Bantuan Sosial hingga akhir Maret 2023 telah mencapai Rp31,91 triliun, realisasi tersebut dimanfaatkan di antaranya untuk mendukung penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako.

Realisasi Belanja Subsidi sampai dengan akhir Maret 2023 mencapai Rp37,54 triliun atau 12,57 persen dari Pagu atau menurun 2,54 persen (*yoy*). Realisasi Belanja Subsidi tersebut dipengaruhi oleh subsidi energi sebesar Rp24,49 triliun (turun 24,69 persen *yoy*) dan subsidi nonenergi sebesar Rp13,05 triliun (naik 117,64 persen *yoy*).

Realisasi Belanja Subsidi Energi utamanya bersumber dari subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan subsidi LPG Tabung 3 Kg yang mencapai Rp14,48 triliun atau 10,38 persen dari pagu APBN 2023, atau menurun 41,85 persen (*yoy*). Penurunan realisasi subsidi BBM dan subsidi LPG Tabung 3 Kg di antaranya dipengaruhi penurunan ICP

yang rata-rata turun sebesar 21,18 persen (*yoy*) selama periode Januari-Maret 2023. Namun, apabila dilihat dari sisi volume konsumsi jenis BBM tertentu (JBT) dan LPG 3 Kg justru mengalami kenaikan. Total volume konsumsi JBT (minyak tanah, solar, dan biosolar) hingga Februari 2023 mengalami kenaikan sebesar 5,73 persen (*yoy*), sementara untuk volume konsumsi LPG 3 Kg juga naik yaitu sebesar 6,26 persen (*yoy*). **Sebaliknya, realisasi subsidi listrik mencapai Rp10,01 triliun atau 13,80 persen dari Pagu** atau mengalami kenaikan sebesar 31,35 persen (*yoy*).

Sementara itu, realisasi Belanja Subsidi Nonenergi pada Januari-Maret 2023 mencapai sebesar Rp13,05 triliun, atau 15,08 persen dari Pagu. Realisasi tersebut didominasi oleh Subsidi Kredit Program sebesar Rp12,86 triliun atau 98,56 persen dari total realisasi Subsidi Nonenergi, sedangkan sisanya disumbang oleh realisasi Subsidi *Public Service Obligation* (PSO) yang tercatat sebesar Rp0,19 triliun atau sebesar 1,44 persen. Realisasi Subsidi Kredit Program tersebut utamanya disumbang oleh realisasi Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah terealisasi sebesar Rp12,50 triliun atau 30,53 persen bila dibandingkan dengan alokasi pagu Subsidi Bunga KUR serta tumbuh 211,12 persen (*yoy*). Adapun penyaluran tahun berjalan jenis Subsidi Nonenergi Lainnya belum terdapat realisasi, dikarenakan masih adanya proses administrasi dan verifikasi dalam penyaluran subsidi.

Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Maret 2023 mencapai Rp171,39triliun atau 21,04 persen dari Pagu. Dana Otonomi Khusus (Otsus) menjadi satu-satunya jenis transfer yang belum ada realisasinya karena pemerintah daerah (pemda) di pulau Papua masih berproses dalam memenuhi syarat penyaluran.

Dilihat dari pertumbuhannya, realisasi TKD lebih rendah Rp5,07 triliun, turun 2,88 persen (*yoy*). Secara umum, penurunan realisasi TKD disebabkan oleh realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebesar Rp104,26 triliun, lebih rendah Rp16,78 triliun (minus 13,87 persen *yoy*). Hal itu terjadi seiring dengan penurunan kepatuhan pemda dalam memenuhi syarat salur dan masih rendahnya penyaluran DAU yang ditentukan penggunaannya (9,1 persen dari Pagu). Jenis TKD lain yang mengalami penurunan realisasi di antaranya: 1)

Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik turun Rp0,11 triliun (minus 0,35 persen *yoy*); 2) Dana Keistimewaan (Dais) DI Yogyakarta turun Rp0,03 triliun (minus 16,31 persen *yoy*); dan 3) Insentif Fiskal turun Rp0,15 triliun (minus 48,62 persen *yoy*) seiring dengan adanya mekanisme baru dalam penyaluran.

Sementara itu, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH), DAK Fisik, Hibah ke Daerah, dan Dana Desa berhasil mencatat pertumbuhan positif. Realisasi DBH mencapai Rp22,25 triliun, lebih tinggi Rp9,64 triliun (76,41 persen *yoy*). Realisasi DBH yang tinggi terutama didukung oleh lebih tingginya realisasi Penerimaan DBH-SDA Pertambangan Umum sebesar Rp6,67 triliun (176,78 persen *yoy*) dan DBH-PPh Perorangan Rp1,03 triliun (26,78 persen *yoy*). Realisasi DAK Fisik mencapai Rp0,17 triliun, lebih tinggi Rp0,08 triliun (83,84 persen *yoy*) karena realisasi DAK Infrastruktur Publik Daerah tahun ini lebih tinggi Rp0,12 triliun (252,14 persen *yoy*). Kemudian, Hibah ke Daerah sebagai dana transfer yang baru masuk dalam struktur TKD, realisasinya mencapai Rp0,03 triliun (1,8 persen dari pagu). Realisasi Dana Desa mencapai Rp13,03 triliun, lebih tinggi Rp2,25 triliun (20,89 persen *yoy*) sejalan dengan peningkatan kepatuhan pemerintah desa dalam memenuhi syarat salur tahap I.

Keberlanjutan fiskal di tahun 2023 diharapkan akan tetap terjaga. Realisasi surplus APBN hingga Maret 2023 mencapai sebesar Rp128,50 triliun (0,61 persen dari PDB). Realisasi surplus tersebut disebabkan oleh Pendapatan Negara dan Hibah hingga akhir Maret 2023 mencapai Rp647,15 triliun, sedangkan Belanja mencapai Rp518,66 triliun. Sementara itu, realisasi Pembiayaan Anggaran hingga akhir Maret 2023 mencapai Rp203,72 triliun (34,10 persen terhadap Pagu). Realisasi Pembiayaan tersebut didominasi oleh Pembiayaan Utang sebesar Rp224,79 triliun (32,30 persen terhadap pagu APBN 2023) yang terdiri atas realisasi Surat Berharga Negara (Neto) sebesar Rp217,59 triliun dan Pinjaman (Neto) sebesar Rp7,20 triliun yang berasal dari Pinjaman Dalam Negeri (Neto) sebesar negatif Rp362,90 miliar dan Pinjaman Luar Negeri (Neto) sebesar Rp7,56 triliun.

Hingga akhir Maret 2023, Pemerintah melakukan Penarikan Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp107,30 miliar dan membayar cicilan pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar negatif Rp470,10 miliar. Di sisi lain, Pemerintah juga melakukan penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)

sebesar Rp27,84 triliun dan Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri sebesar negatif Rp20,28 triliun.
Di samping Pembiayaan Utang, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran pembiayaan untuk Investasi sebesar negatif Rp22,24 triliun yang digunakan untuk Investasi Pemerintah sebesar negatif Rp6,00 triliun, Investasi kepada BLU sebesar negatif Rp17,00 triliun dan memperoleh Penerimaan Kembali dari Investasi sebesar Rp756,40 miliar. Pemerintah juga memberikan Pinjaman sebesar Rp1,05 triliun dan merealisasikan anggaran untuk Pembiayaan Lainnya sebesar Rp130,70 miliar.

Perkembangan Ekonomi Makro

Perkembangan Ekonomi Makro

Penguatan pemulihan ekonomi terus berlanjut di kuartal I 2023 setelah mengalami kinerja positif di 2022. Beberapa indikator ekonomi terus mengalami penguatan hingga akhir Maret 2023. Sektor Manufaktur Indonesia secara konsisten mengalami ekspansi dalam 19 bulan berturut-turut yang ditunjukkan menguatnya *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufaktur di Maret 2023 pada level 51,9. Penguatan aktivitas manufaktur nasional didorong oleh peningkatan permintaan domestik. Dari sisi konsumsi, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) meningkat menjadi 123,3 di Maret 2023 dari 122,4 di Februari 2023 yang mengindikasikan optimisme masyarakat terhadap perkembangan ekonomi ke depan terus menguat. Optimalisasi peran APBN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2023 juga turut mendorong prospek positif kinerja ekonomi nasional.

Di tengah ketidakpastian pasar keuangan global, stabilitas pasar keuangan nasional masih tetap terjaga. Perkembangan sektor keuangan nasional cenderung menguat hingga awal April 2023. Pasar saham domestik masih cukup kuat dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat meningkat ke level 6.821,81 pada 18 April 2023. Pergerakan nilai tukar Rupiah di awal April 2023 terus mengalami tren menguat. Nilai tukar Rupiah mengacu pada Kurs Tengah Transaksi Bank Indonesia tercatat sebesar Rp14.773 per USD pada 18 April 2023. Hingga 18 April 2023, rata- rata nilai tukar Rupiah tercatat sebesar Rp15.187 per USD, mengalami apresiasi sebesar 5,25 persen dibandingkan level di awal tahun 2023. Laju inflasi Maret 2023 tercatat 4,97 persen (*yoy*), melambat dibandingkan Februari 2023 (5,47 persen) dipengaruhi oleh perlambatan inflasi seluruh komponen. Secara bulanan, inflasi Maret mencapai 0,18 persen (*mtm*), sedikit lebih tinggi dari Februari 0,16 persen (*mtm*) seiring naiknya permintaan pada masa Ramadan. Dalam menghadapi tekanan inflasi selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Lebaran, Pemerintah Pusat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah terus mengantisipasi lonjakan harga dengan berbagai kebijakan intervensi, antara lain: operasi pasar, pasar murah, serta melakukan monitoring ketersediaan pasokan pangan. Posisi cadangan devisa Indonesia per akhir Maret 2023 tercatat sebesar USD145,19 miliar, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar USD140,31 miliar. Posisi cadangan devisa ini terus berada pada posisi yang kuat dalam menopang daya tahan ekonomi nasional terhadap guncangan eksternal.

Sektor pariwisata nasional terus menggeliat di awal tahun 2023 dan memberikan dampak positif terhadap perkembangan sektor terkait lainnya. Peningkatan aktivitas sektor pariwisata akan mendorong aktivitas sektor pendukung seperti, makanan dan akomodasi, hotel, transportasi, serta perdagangan. Peningkatan aktivitas sektor pariwisata ditunjukkan dengan peningkatan secara pesat

jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke dalam negeri. Kunjungan wisman ke Indonesia pada Februari 2023 mencapai 701,93 ribu kunjungan, naik lebih dari 5 kali lipat dibandingkan kondisi pada Februari 2022. Namun, kunjungan wisman Februari 2023 ini menurun sebesar 4,62 persen dibandingkan Januari 2023 lebih karena faktor musiman liburan. Secara kumulatif, jumlah kunjungan wisman tercatat sebesar 1,4 juta kunjungan. Demikian pula dengan kondisi Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang di Indonesia pada Februari 2023 tercatat 47,83 persen, naik 9,29 poin dibandingkan Februari 2022. TPK Februari 2023 juga mengalami peningkatan sebesar 1,26 poin dibandingkan Januari 2023.

Postur APBN

Postur APBN

Realisasi APBN sampai dengan 31 Maret 2023 mencatatkan surplus sebesar 0,61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tahun 2022 surplus APBN sebesar 0,06 persen terhadap PDB. Realisasi Pendapatan Negara yang mencapai Rp647,15 triliun atau meningkat 28,98 persen (*yoy*). Di sisi lain, realisasi Belanja Negara mencapai Rp518,66 triliun atau meningkat 5,70 persen (*yoy*).

Ralisasi Pendapatan Negara telah terealisasi sebesar 26,27 persen Target, terdiri atas:

Realisasi Penerimaan Perpajakan yang telah mencapai Rp504,48 triliun atau 24,96 persen dari Target dan tumbuh 25,36 persen (*yoy*), terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp432,25 triliun (25,16 persen Target) dan tumbuh 33,78 persen (*yoy*) serta Penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp72,24 triiliun (23,83 persen Target).

PNBP mencatatkan realisasi sebesar Rp142,66 triliun (32,32 persen Target) dan tumbuh 43,75 persen (*yoy*).

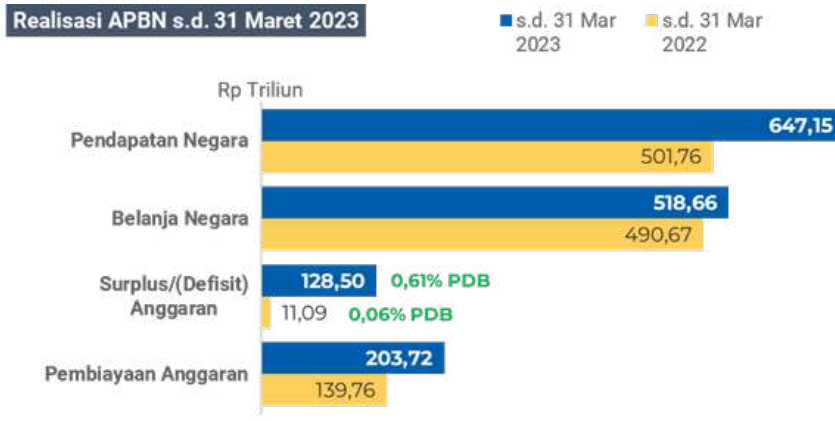
Realisasi APBN s.d. 31 Maret 2023
s.d. 31 Mar 2023
s.d. 31 Mar 2022
Rp Triliun
Pendapatan Negara
647,15
501,76
Belanja Negara
518,66
490,67
Surplus/(Defisit) Anggaran
128,50
0,61% PDB
11,09
0,06% PDB
Pembiayaan Anggaran
203,72
139,76

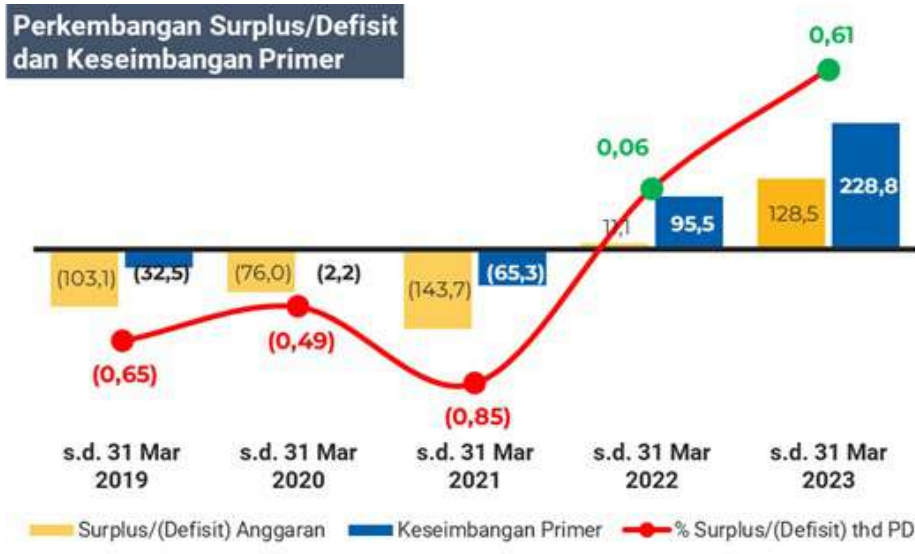
Perkembangan Surplus/Defisit dan Keseimbangan Primer
(103,1)
(32,5)
(76,0)
(2,2)
(143,7)
(65,3)
11,1
95,5
128,5
228,8
(0,65)
(0,49)
(0,85)
0,06
0,61
s.d. 31 Mar 2019
s.d. 31 Mar 2020
s.d. 31 Mar 2021
s.d. 31 Mar 2022
s.d. 31 Mar 2023
Surplus/(Defisit) Anggaran
Keseimbangan Primer
% Surplus/(Defisit) thd PDB

Penerimaan Hibah telah terealisasi sebesar Rp13,67 miliar, lebih rendah dari realisasi periode yang sama tahun 2022 yang mencapai Rp108,41 miliar.

Belanja Negara telah terealisasi sebesar 16,94 persen dari Pagu, terdiri atas:

BPP sebesar Rp347,27 triliun (15,46 persen Pagu) dan tumbuh sebesar 10,52 persen (*yoy*). Realisasi tersebut terdiri dari realisasi Belanja K/L sebesar Rp166,93 triliun (16,68 persen Pagu), tumbuh 11,30 persen (*yoy*) dan realisasi Belanja non-K/L yang mencapai Rp180,34 triliun (14,48 persen Pagu) dan meningkat 9,81 persen (*yoy*).

TKD sebesar Rp171,39 triliun (21,04 persen dari Pagu), lebih rendah dari realisasi pada periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp176,46 triliun.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Belanja Negara tersebut, sampai dengan 31 Maret 2023 APBN mengalami surplus sebesar Rp128,50 triliun (0,61 persen terhadap PDB) dan keseimbangan primer juga mengalami surplus sebesar Rp228,76 triliun. Sementara itu, realisasi Pembiayaan Anggaran sebesar Rp203,72 triliun (34,06 persen dari Target).

Realisasi APBN s.d. 31 Maret 2023

APBN (triliun rupiah)	2022				2023			
	Perpres 98/2022	Realisasi s.d. 31 Mar	% thd Perpres 98/2022	Growth (%)	APBN	Realisasi s.d. 31 Mar	% thd APBN	Growth (%)
A. Pendapatan Negara	**2.266,20**	**501,76**	**22,14**	**32,26**	**2.463,02**	**647,15**	**26,27**	**28,98**
I. Pendapatan Dalam Negeri	**2.265,62**	**501,66**	**22,14**	**32,35**	**2.462,62**	**647,14**	**26,28**	**29,00**
1. Penerimaan Perpajakan	1.783,99	402,42	22,56	38,57	2.021,22	504,48	24,96	25,36
a. Pajak	1.484,96	323,10	21,76	41,64	1.718,03	432,25	25,16	33,78
b. Kepabeanan dan Cukai	299,03	79,32	26,52	27,34	303,19	72,24	23,83	(8,93)
2. PNBP	481,63	99,24	20,60	11,96	441,39	142,66	32,32	43,75
II. Penerimaan Hibah	**0,58**	**0,11**	**18,70**	**(67,03)**	**0,41**	**0,01**	**3,34**	**(87,39)**
B. Belanja Negara	**3.106,43**	**490,67**	**15,80**	**(6,19)**	**3.061,18**	**518,66**	**16,94**	**5,70**
I. Belanja Pemerintah Pusat	**2.301,64**	**314,21**	**13,65**	**(10,25)**	**2.246,46**	**347,27**	**15,46**	**10,52**
1. Belanja K/L	945,75	149,98	15,86	(25,62)	1.000,84	166,93	16,68	11,30
2. Belanja Non K/L	1.355,89	164,23	12,11	10,63	1.245,61	180,34	14,48	9,81
II. Transfer Ke Daerah	**804,78**	**176,46**	**21,93**	**2,02**	**814,72**	**171,39**	**21,04**	**(2,88)**
C. Keseimbangan Primer	**(434,36)**	**95,49**	**(21,98)**	**246,26**	**(156,75)**	**228,76**	**(145,93)**	**139,56**
D. Surplus/(Defisit) Anggaran	**(840,23)**	**11,09**	**(1,32)**	**107,72**	**(598,15)**	**128,50**	**(21,48)**	**1.058,42**
% Surplus/(Defisit) thd PDB	***(4,50)***	***0,06***			***(2,84)***	***0,61***		
E. Pembiayaan Anggaran	**840,23**	**139,76**	**16,63**	**(58,01)**	**598,15**	**203,72**	**34,06**	**45,76**

Jumlah Wajib Pajak Lapor SPT Elektronik Semakin Meningkat

Ada kabar menggembirakan pada musim penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh tahun ini. SPT yang masuk sampai dengan 1 April 2023 pukul 00:00:21 mengalami peningkatan sebesar 3,13 persen (*yoy*).

SPT yang masuk pada tahun 2022 hanya sebanyak 11.651.390 SPT. Sedangkan pada tahun ini, SPT Tahunan yang masuk sebanyak 12.016.189 SPT. Jumlah tersebut terdiri dari SPT Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) sebanyak 11.682.479 SPT dan 333.710 SPT Wajib Pajak Badan (WP Badan). Angka sebesar 12.016.189 SPT ini setara dengan 61,80 persen dari angka rasio kepatuhan SPT Tahunan 2023.

Seperti diketahui, dari basis data yang dimiliki Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terdapat jumlah 19.443.949 wajib lapor SPT. Dari angka tersebut, sebanyak

17.516.695 wajib lapor SPT merupakan WP OP. Sisanya sebanyak 1.927.254 wajib lapor SPT merupakan wajib pajak badan. DJP memiliki target rasio kepatuhan SPT Tahunan tahun 2023 sebanyak 83 persen dari total wajib lapor SPT di atas atau setara 16,1 juta SPT.

Keberhasilan DJP menerima 12,01 juta SPT tersebut sebagiannya ditunjang melalui pemberian layanan yang memudahkan wajib pajak. Tahun ini, DJP telah menyediakan layanan perpajakan di luar kantor di 4.832 titik Pojok Pajak, menyediakan layanan di akhir pekan, serta berinovasi menambah fitur lupa *Electronic Filing Identification Number* (EFIN) di aplikasi M-Pajak.

Penambahan fitur lupa EFIN dalam aplikasi tersebut bukan tanpa sebab. WP OP memiliki kewajiban melaporkan SPT Tahunan PPh melalui *e-Filing*. Untuk mengakses *e-Filing* memerlukan kata sandi (*password*). Karena *e-Filing* itu digunakan setahun sekali, seringkali wajib pajak lupa kata sandi tersebut. Untuk mengatur ulang kata sandi itu, wajib pajak membutuhkan EFIN.

Sayangnya wajib pajak juga seringkali lupa EFIN. Oleh karena itu, hal yang sering ditanyakan oleh wajib pajak pada saat musim penyampaian SPT Tahunan PPh orang pribadi adalah EFIN. Fitur mendapatkan EFIN di aplikasi M-Pajak memberikan alternatif tambahan kanal untuk mendapatkan EFIN yang selama ini ada.

SPT Elektronik

Yang lebih menggembirakan lagi adalah dari total jumlah SPT Tahunan yang masuk sebesar 12.016.189 SPT, sebanyak 97,04 persen wajib pajak melaporkan SPT secara elektronik, baik melalui *e-Filing, e-Form*, dan *e-SPT*. Jumlah yang melaporkan SPT Tahunan secara manual sebanyak 355.400 SPT. Jumlah tersebut turun drastis dibandingkan tahun lalu yang mencapai 564.684 SPT.

Penurunan ini menandakan keberhasilan Kementerian Keuangan dalam mengampanyekan pelaporan SPT Tahunan secara elektronik. Sekaligus keberhasilan Kementerian Keuangan dalam mengimbau masyarakat untuk melaporkan SPT Tahunan melalui surat elektronik kepada wajib pajak.

Sejak Januari 2023, DJP mengirimkan surat elektronik kepada 269.451 pemberi kerja untuk segera menerbitkan bukti pemotongan kepada karyawannya. Ini dimaksudkan supaya para karyawan tersebut segera melaporkan SPT-nya dalam kesempatan pertama setelah menerima bukti pemotongannya dari pemberi kerja.

DJP juga mengirimkan surat elektronik kepada 17.779.166 alamat surat elektronik wajib pajak orang pribadi sepanjang bulan Februari dan Maret 2023. Surat elektronik itu berisi imbauan agar WP OP segera melaporkan SPT Tahunannya karena lebih awal lebih nyaman. Sekaligus untuk menghindari berbagai permasalahan yang ada jika wajib pajak melaporkan SPT Tahunan pada saat akhir jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP pada akhir Maret 2023.

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan WP OP memang pada 31 Maret 2023. Ini bukan berarti menutup kesempatan wajib pajak untuk lapor pajak. WP OP yang belum lapor pajak masih tetap dapat melaporkan SPT Tahunannya kapan pun, walaupun tentunya dengan risiko pengenaan denda keterlambatan pelaporan pajak.

Sedangkan untuk wajib pajak badan masih ada waktu untuk melaporkan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2022 sampai dengan 30 April 2023. Tentunya angka SPT yang masuk akan terus bertambah. Terutama sepanjang April 2023 ini. Untuk itu pada April

2023, DJP mengirimkan surat elektronik kepada para WP Badan. Isinya serupa, berisi imbauan untuk segera melaporkan SPT Tahunan PPh Badan.

Kementerian Keuangan terus mengedukasi masyarakat untuk melaporkan SPT Tahunannya. Masih ada waktu sampai akhir tahun supaya DJP dapat mencapai target rasio kepatuhan SPT Tahunan 2023.

Infografis Penerimaan SPT Tahunan WP OP dan WP Badan

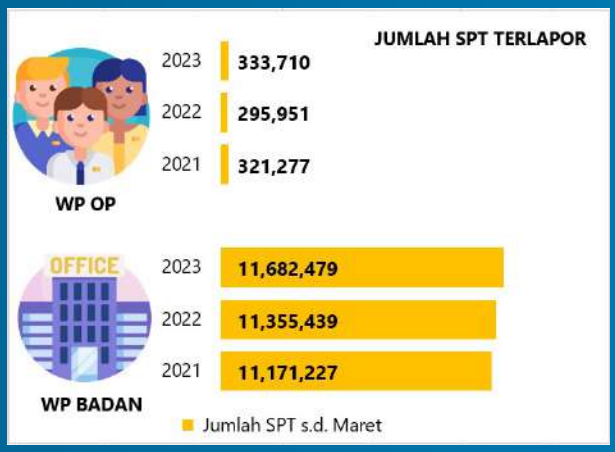

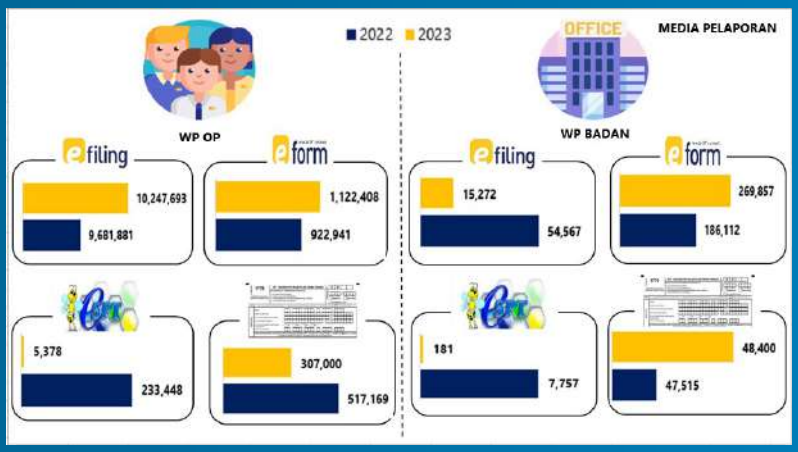

e-PSPT, Inovasi Digital Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan senantiasa memberikan kemudahan kepada wajib pajak melalui layanan digital, salah satunya melalui penambahan kanal penyampaian pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan PPh secara elektronik atau *e-PSPT*. Aplikasi ini diluncurkan pada akhir Maret 2023 dan dapat diakses melalui akun wajib pajak di situs web pajak di https://pajak.go.id.

Ada beberapa tahapan agar wajib pajak dapat menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan. Pertama, wajib pajak harus *login* terlebih dahulu ke akun pajak yang ada di situs web pajak kemudian memilih menu "Profil". Wajib pajak perlu melakukan penambahan hak akses ke dalam profilnya dengan cara memilih menu "Aktivasi Fitur" dan mencentang kotak *"e-PSPT"*. Selanjutnya, wajib pajak mengeklik tombol "Ubah

Fitur Layanan" sehingga muncul notifikasi "Apakah Anda yakin ingin Mengubah?" dan klik pilihan "Ya". Apabila Langkah tersebut sudah dilakukan, maka wajib pajak secara otomatis akan diarahkan untuk *login* kembali.

Langkah berikutnya setelah *login* ulang, wajib pajak memilih menu "Layanan" dan mengeklik ikon *e-PSPT* sehingga muncul dasbor permohonan perpanjangan SPT. Wajib pajak memilih tab "Pemberitahuan" dan memilih Tahun Pajak yang akan diajukan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan.

Selanjutnya, akan dilakukan validasi atas tahun pajak yang dipilih, yaitu: SPT Tahunan belum disampaikan; SPT Tahunan tidak ada yang diproses atau diajukan perpanjangan sebelumnya namun sudah selesai diproses; atau belum melebihi jatuh tempo SPT Tahunan. Apabila lolos validasi tahun pajak, maka wajib pajak diminta mengisi formulir pemberitahuan dengan menyiapkan sertifikat elektronik untuk *submit* pemberitahuan.

Selain tab "*Dashboard*" dan "Pemberitahuan", tersedia juga tab "*Monitoring*" untuk memantau tindak lanjut permohonan yang telah di-*submit*. Terdapat menu "*Tracking*" untuk melacak sejauh mana permohonan diproses, yaitu dengan status: Diajukan, Disposisi Pengajuan Permohonan, Penelitian, Persetujuan/ Penolakan, Pencetakan Dokumen, atau Selesai. Wajib pajak dapat mengunduh dokumen produk hukum pada *tab Dashboard* bila status permohonannya adalah "Selesai".

Menurut ketentuan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan, wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan untuk paling lama dua bulan sejak batas waktu penyampaian SPT Tahunan dengan cara menyampaikan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan. Sehingga, perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak paling lama lima bulan setelah akhir Tahun Pajak untuk WP OP; atau paling lama enam bulan setelah akhir Tahun Pajak untuk WP Badan.

Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan wajib disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir, yaitu paling lama tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak untuk wajib pajak orang pribadi, atau paling lama empat bulan setelah akhir Tahun Pajak untuk

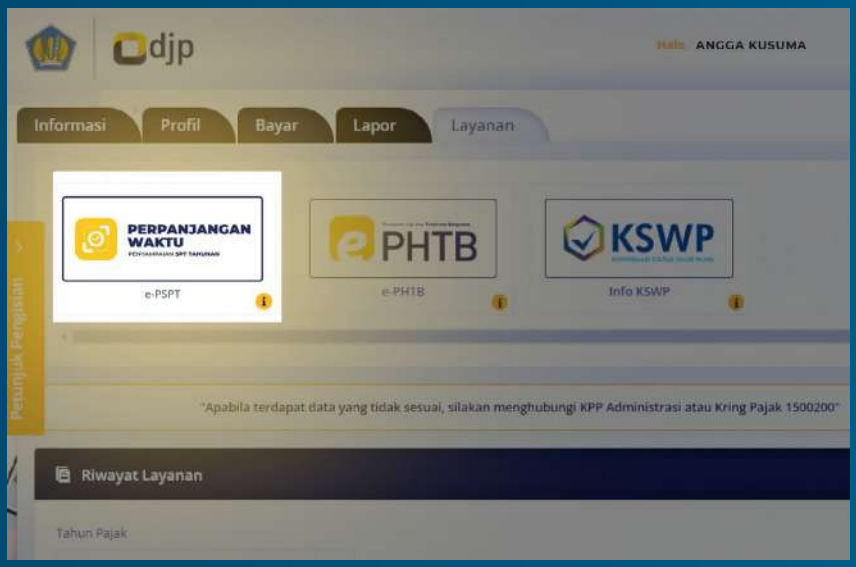

SPT Tahunan WP Badan.

WP Badan atau WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib menyebutkan alasan perpanjangan dan melakukan penghitungan sementara pajak terutang dalam satu Tahun Pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang, serta melampirkan: Laporan Keuangan Sementara untuk Tahun Pajak yang bersangkutan dari wajib pajak itu sendiri (bukan Laporan Keuangan Sementara dari konsolidasi grup); Surat Setoran PPh Pasal 29 sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang kecuali ada ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran PPh Pasal 29; dan Surat Pernyataan dari Akuntan Publik yang menyatakan audit Laporan Keuangan belum selesai dalam hal Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik.

Untuk WP OP karyawan yang mengajukan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan, wajib melampirkan Surat Pernyataan dari pemberi kerja yang menyatakan bahwa bukti potong PPh Pasal 21 (Formulir 1721-A1 dan/atau Formulir 1721-A2) belum diberikan oleh pemberi kerja.

Dalam hal wajib pajak belum siap untuk menyampaikan SPT Tahunan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan yang diajukan sebelumnya, maka wajib pajak masih dapat menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan lagi sepanjang tidak melampaui batas waktu paling lama lima bulan setelah akhir Tahun Pajak untuk wajib

pajak orang pribadi; atau paling lama enam bulan setelah akhir Tahun Pajak untuk wajib pajak badan. Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan sesuai batas waktu yang ditentukan atau belum menyampaikan dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, akan diterbitkan "Surat Teguran" oleh Kantor Pajak tempat terdaftar.

Dengan aplikasi *e-PSPT,* wajib pajak akan lebih mudah dalam menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan, meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya kepatuhan wajib pajak, mengurangi pertemuan langsung antara wajib pajak dan petugas pajak, serta mendorong penyelesaian layanan agar semakin efektif dan efisien.

Tingkatkan Kecepatan Pelayanan, Bea Cukai Berikan Kemudahan Layanan Registrasi IMEI

Bea Cukai terus melakukan perbaikan terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini merupakan bukti nyata komitmen Bea Cukai untuk terus menjadi institusi yang dapat dipercaya dan diandalkan oleh masyarakat. Salah satu bentuk penyempurnaan layanan terbaru dari Bea Cukai adalah kemudahan layanan registrasi *International Mobile Equipment Identity* (IMEI).

Kemudahan layanan registrasi IMEI ini diatur dalam aturan terbaru berupa Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-7/BC/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-13/BC/2021 Tentang Tata Cara Pemberitahuan Dan Pendaftaran *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) Atas Perangkat Telekomunikasi Dalam Pemberitahuan Pabean. Peraturan tersebut telah berlaku sejak 13 Maret 2023.

Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan, Hatta Wardhana, mengungkapkan bahwa terdapat beberapa poin perubahan dalam peraturan terbaru yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan proses layanan registrasi IMEI.

"Dalam aturan terbaru ini, Bea Cukai melakukan perbaikan layanan melalui penyederhanaan prosedur registrasi IMEI yang telah terintegrasi dengan *electronic customs declaration* (ECD), khususnya di bandara yang mewajibkan penggunaan ECD seperti di Soekarno Hatta dan Ngurah Rai."

Selain itu, terdapat perbaikan layanan berupa penyediaan skema baru yaitu pemindaian IMEI dan input paspor untuk penumpang yang belum mengisi ECD atau form registrasi IMEI. "kemudahan ini bermanfaat untuk mempercepat layanan dengan memilah antara HKT (Handphone, Komputer genggam, dan Tablet) yang mendapatkan pembebasan USD500 dengan antrean HKT yang bernilai di atas USD 500," ujar Hatta.

Setelah dilakukan pemindaian IMEI dan input paspor, apabila harga HKT di bawah USD 500, maka proses registrasi IMEI selesai. Apabila harga HKT di atas USD 500, maka akan dilakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian lebih lanjut tersebut dapat diselesaikan di Bandara kedatangan atau penumpang dapat mengurus di kantor pelayanan Bea Cukai di luar Bandara yang dekat dengan tempat tinggalnya dan tetap mendapatkan pembebasan USD 500 sepanjang masih

dalam kurun waktu 5 hari sejak kedatangan. Penumpang dapat menggunakan opsi pendaftaran di kantor pelayanan Bea Cukai dengan syarat harus menyerahkan hasil pindai atau *scan barcode* IMEI saat kedatangan.

Peraturan ini juga mengatur terkait perubahan data IMEI jika terjadi kesalahan input pada pendaftaran. "Penumpang dapat mengajukan permohonan beserta dokumen pendukung ke Kantor Bea Cukai tempat mendaftar, maksimal 30 hari sejak tanggal persetujuan pendaftaran IMEI," ungkap Hatta.

Piloting atas implementasi peraturan ini juga telah dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Juanda. Antrean registrasi IMEI di Bandara Soekarno-Hatta turun berkisar 70-75 persen, sehingga petugas Bea Cukai hanya melayani 25-30 persen dari total penumpang yang mendaftarkan IMEI-nya. Sementara itu, di Bandara Juanda penurunan antrean registrasi IMEI berkisar antara 91-97 persen, sehingga petugas Bea Cukai hanya melayani 3-9 persen dari total penumpang yang mendaftarkan IMEI-nya.

Hatta menambahkan, aturan terbaru ini dibuat sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan pelayaan yang diinginkan masyarakat. "Kami senantiasa mendengarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat terkait implementasi aturan atau kebijakan. Ruang perbaikan akan selalu terbuka agar kami bisa terus menjadi makin baik."

Informasi lebih lanjut mengenai ketentuan terbaru terkait tata cara pendaftaran IMEI terbaru dapat diakses melalui tautan bit.ly/PER7_BC_2023 atau dapat menghubungi *contact center Bravo* Bea Cukai pada 1500225.

Ingin Barang Pindahan dari Luar Negeri Tidak Kena Pajak? Simak Ketentuan dan Aturannya

Bea Cukai memberikan penjelasan terkait aturan barang pindahan dari luar negeri yang tidak datang bersama penumpang dan dikirim menggunakan jasa ekspedisi.

Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat dan Penyuluhan, Hatta Wardhana, menyatakan bahwa barang pindahan dari luar negeri bisa mendapatkan fasilitas pembebasan. Barang pindahan tersebut merupakan barang keperluan rumah tangga milik orang yang semula berdomisili luar negeri pindah ke dalam negeri ataupun sebaliknya. "Barang pindahan mendapatkan fasilitas kemudahan yaitu pembebasan bea masuk, kecuali barang dagangan dan kendaraan bermotor," ujar Hatta.

Hatta menjelaskan bahwa pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 tahun 2008, terdapat klasifikasi yang dapat mengajukan proses kepabeanan

barang pindahan, yaitu PNS/ anggota TNI dan Polri, pelajar/ mahasiswa, tenaga kerja, Warga Negara Indonesia (WNI) yang pindah ke Indonesia karena pekerjaan, dan Warga Negara Asing (WNA) yang pindah ke Indonesia karena pekerjaan. "Syarat utamanya yaitu telah menetap selama satu tahun dan disertai dokumen lengkap dalam mengirim barangnya seperti *bill of lading* (kapal) dan *air waybill* (pesawat), *packing list, paspor, boarding pass*," tambah Hatta.

Barang pindahan bisa datang bersama dengan penumpang, ataupun tiga bulan sebelum/ setelah penumpang pergi dan datang. Jika syarat sudah terpenuhi dan dokumen terlengkapi Bea Cukai juga akan segera menerbitkan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) yang bisa digunakan untuk pengiriman barang. Beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam mengirimkan barang pindahan adalah daftar rincian jumlah, jenis, dan perkiraan nilai pabean atas barang yang dimintakan untuk pembebasan bea masuk yang sudah dilegalisasi.

Dalam hal ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka barang tersebut akan dikategorikan sebagai barang kiriman. Aturan terkait barang kiriman mengacu pada ketentuan barang kiriman yang diatur dalam PMK Nomor 199/ PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman. "Dalam hal menggunakan skema barang kiriman, pembebasan hanya diberikan sebesar USD3.00 per penerima barang kiriman," ujar Hatta.

Kebijakan yang telah ditetapkan tersebut merupakan upaya Bea Cukai dalam melindungi kepentingan

nasional karena serta untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. “Pengawasan dan pengenaan pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor oleh Bea Cukai ditujukan semata untuk melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas perekonomian dalam negeri,” ungkap Hatta.

Bea Cukai juga memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah mematuhi ketentuan di bidang impor terutama terkait barang kiriman. “Bea Cukai mengungkapkan apresiasi kepada masyarakat yang telah memenuhi ketentuan impor barang kiriman, kami juga terbuka terhadap kritik dan saran yang disampaikan masyarakat untuk dapat membuat kebijakan yang lebih baik ke depannya. Hal tersebut dapat disampaikan melalui akun sosial media resmi kami atau melalui pusat kontak layanan Bravo Bea Cukai 1500225,” pungkas Hatta.

Resmi Dimulai, Patroli Laut Terpadu Bea Cukai Siap Amankan Wilayah Perairan Indonesia

Menjalankan fungsi pengawasan dalam menjaga perbatasan laut Indonesia dari ancaman masuk dan keluarnya barang-barang ilegal dan berbahaya, Bea Cukai kembali menggelar Patroli Laut Terpadu Jaring Sriwijaya dan Jaring Wallacea tahun 2023. Bekerja sama dengan K/L terkait, patroli laut terpadu ini secara resmi telah dimulai pada Selasa, 21 Maret 2023.

Operasi Patroli Laut Terpadu Jaring Sriwijaya dan Jaring Wallacea akan melibatkan satuan kerja Bea Cukai di seluruh Indonesia, baik di wilayah barat maupun timur. Dilaksanakan setiap tahun, operasi terpadu kali ini digelar sebagai tindak lanjut instruksi Presiden Republik Indonesia terkait penyelundupan bale pressed yang mengganggu industri tekstil dalam negeri dan menjadi media pembawa penyakit.

"Namun pengawasan tetap akan dilakukan terhadap seluruh barang yang melanggar ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai," tegas Nirwala Dwi Heryanto, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa, Bea Cukai.

Nirwala menambahkan bahwa pembukaan Operasi Patroli Laut Terpadu Bea Cukai tahun 2023 dikonsentrasikan di Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea Cukai Tanjung Priok. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyematan brevet kehormatan patroli laut Bea Cukai kepada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) beserta jajaran sebagai dukungan dan kolaborasi dalam pemberantasan penyelundupan narkotika melalui jalur laut.

Menilik pelaksanaannya di tahun 2022, Patroli Laut Terpadu Bea Cukai dinilai cukup efektf karena mampu melakukan 28 penindakan pelanggaran impor dan ekspor dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp258.475.072.800 dan potensi kerugian negara sebesar Rp246.980.279.390. Berbagai komoditas berhasil ditindak, seperti minuman mengandung etil alkohol (MMEA), BBM, baby lobster (BL), rokok, narkotika psikotropika dan prekursor (NPP), kayu gergajian dan kayu teki, uang tunai, tekstil,

ball pressed, serta barang campuran.

"Yang fenomenal akhir-akhir ini adalah keberhasilan operasi patroli laut Bea Cukai dan BNN dalam menggagalkan penyelundupan sebanyak 319.230 gram (309 bungkus) narkotika jenis *methamphetamine* (sabu-sabu) jaringan Iran di Perairan Samudera Hindia Selatan Banten. Keberhasilan ini terjadi berkat perencanaan dan strategi yang matang dengan mitigasi segala kemungkinan risiko. Penting adanya trust yang terjalin antara Bea Cukai dan K/L lainnya," ungkap Nirwala.

Selain itu, dalam mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan wilayah perairan Indonesia, Bea Cukai telah melakukan kerja sama dengan K/L terkait, seperti Bakamla dan TNI AL dalam Patroli Yudhistira, KPLP, Polairud, dan PSDKP dalam Operasi Sinergi Pandawa, serta BNN dalam Operasi Laut Purnama

"Bea Cukai membutuhkan dukungan masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan patroli laut terpadu tahun 2023. Untuk itu mari bersama menjaga muruah wilayah perairan Indonesia, tindak barang-barang terlarang dan berbahaya," pungkas Nirwala.

"Namun pengawasan tetap akan dilakukan terhadap seluruh barang yang melanggar ketentuan di bidang Kepabeanan dan Cukai," tegas Nirwala Dwi Heryanto, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa, Bea Cukai.

Nirwala menambahkan bahwa pembukaan Operasi Patroli Laut Terpadu Bea Cukai tahun 2023 dikonsentrasikan di PSO Bea Cukai Tanjung Priok. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyematan brevet kehormatan patroli laut Bea Cukai kepada Kepala BNN beserta jajaran sebagai dukungan dan kolaborasi dalam pemberantasan penyelundupan narkotika melalui jalur laut.

Menilik pelaksanaannya di tahun 2022, Patroli Laut Terpadu Bea Cukai dinilai cukup efektf karena mampu melakukan 28 penindakan pelanggaran impor dan ekspor dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp258.475.072.800 dan potensi kerugian negara sebesar Rp246.980.279.390. Berbagai komoditas berhasil ditindak, seperti minuman mengandung MMEA, BBM, BL, rokok, narkotika psikotropika dan prekrusor (NPP), kayu gergajian dan kayu teki, uang tunai, tekstil, ball pressed, serta barang campuran.

Penyerahan LKPP Tahun 2022 (*Unaudited*) dan *Entry Meeting* Pemeriksaaan LKPP tahun 2022

Sebagai sebuah rangkaian dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN, Pemerintah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 (*Unaudited*) sekaligus *entry meeting* pemeriksaan LKPP Tahun 2022. LKPP diserahkan oleh Menteri Keuangan didampingi beberapa Menteri/Pimpinan Lembaga yang mewakili Pemerintah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berlangsung pada Selasa, 28 Maret 2022. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan APBN, yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terdiri atas 7 (tujuh) Laporan Utama, yakni: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan

Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dalam CaLK LKPP Tahun 2022 dijelaskan kondisi ekonomi makro dan kebijakan fiskal pada tahun 2022 dengan strategi kebijakan APBN sebagai *shock absorber* untuk melindungi perekonomian dan masyarakat dari dampak risiko ketidakpastian perekonomian global. Selama tahun 2022, fungsi stabilisasi oleh APBN tetap dilaksanakan dengan baik melalui peningkatan belanja subsidi dan kompensasi, dalam rangka melindungi masyarakat serta menjaga momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

Pemerintah selalu dan terus berkomitmen untuk melanjutkan peningkatan kualitas LKPP setiap tahunnya. Komitmen tersebut diwujudkan dalam beberapa langkah yang telah ditempuh selama 2022, diantaranya (i) menyempurnakan sistem pelaporan keuangan dengan implementasi secara menyeluruh aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), (ii) menyempurnakan kebijakan dan petunjuk teknis akuntansi sesuai rekomendasi BPK khususnya dalam rangka penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Konsesi Jasa dan Properti Investasi, (iii) melakukan pembinaan kepada seluruh K/L sehingga dapat meminimalkan temuan berulang dalam LHP BPK, (iv) menjalankan kebijakan *Treasury Deposit Facility* (TDF), serta (v) menindaklanjuti

seluruh rekomendasi BPK dan memonitor penyelesaiannya.

Dengan berbagai komitmen dan langkah konkret Pemerintah, diharapkan dapat terus menjaga budaya opini terbaik atas LKPP. Sebab, opini seharusnya menjadi sebuah kualitas standar yang perlu dan harus diraih pemerintah sebagai bentuk komitmen transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan APBN. Semoga, komunikasi dan kerja sama yang efektif antara Pemerintah dan BPK yang terus dipertahankan, membuat keuangan negara dapat selalu menjadi alat untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.

58.472 Investor Berpartisipasi Membangun Kemandirian Bangsa melalui SR018T3 dan SR018T5

Menyusul keberhasilan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel *dual tranches* (SBN Ritel dengan dua fitur berbeda yang diterbitkan bersamaan) pertama pada Februari-Maret lalu (SBR012-T2 dan SBR012-T4), pemerintah kembali menerbitkan instrumen sejenis, kali ini berbasis syariah dan bersifat *tradable*, melalui Sukuk Ritel seri SR018T3 dan SR018T5. Kedua seri Sukuk Ritel ini diterbitkan menggunakan akad Ijarah *asset to be leased* untuk mendukung pembiayaan APBN termasuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia. Penerbitan SBN Ritel *dual tranches* merupakan sebuah terobosan pemerintah untuk mendukung upaya pendalaman pasar keuangan dan perluasan basis investor domestik.

Lantas, apa yang membedakan SR018T3 dengan SR018T5? Pertama, sesuai namanya,

perbedaan dari kedua seri tersebut adalah dari segi jatuh tempo, di mana SR018T3 memiliki masa jatuh tempo 3 tahun, sedangkan SR018T5 jatuh temponya 5 tahun mendatang. Kedua, dari segi maksimal pemesanan, SR018T3 memiliki nilai maksimal pemesanan yang sama seperti SBN Ritel seri-seri sebelumnya, yaitu Rp5 miliar. Sementara itu, satu orang investor dapat membeli SR018T5 hingga Rp10 miliar. Selanjutnya, meski keduanya memiliki fitur imbal hasil tetap (*fixed rate*), namun besaran imbal hasil yang ditetapkan berbeda, yaitu SR018T3 ditawarkan dengan imbal hasil sebesar 6,25 persen per tahun, sedangkan SR018T5 ditawarkan dengan imbal hasil sebesar 6,40 persen per tahun.

Di samping itu, baik SR018T3 dan SR018T5, ditawarkan dalam bentuk tanpa warkat dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Meski demikian, investor baru bisa memperjual-belikan SR018T3 dan SR018T5 miliknya mulai tanggal 11 Juli 2023 atau setelah minimum *holding period* berakhir pada 10 Juli 2023.

Penjualan Sukuk Ritel seri SR018T3 dan SR018T5 dilakukan secara *online* untuk mempermudah akses masyarakat berinvestasi di Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ritel dan mendukung terwujudnya inklusi keuangan. Dengan mengusung tema "Pilihan Berharga untuk Kemandirian Bangsa" dan tagar #InvestasiRakyatPenuhManfaat, pemerintah memberikan kesempatan kepada setiap Warga Negara Indonesia untuk dapat berinvestasi pada Sukuk Ritel seri SR018T3 dan SR018T5 sekaligus berpartisipasi dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Respon masyarakat cukup baik, dibuktikan dengan antusiasme dan keikutsertaan dalam kegiatan edukasi yang dilaksanakan baik secara *offline* maupun *online* sepanjang masa penawaran SR018T3 dan SR018T5. Rangkaian kegiatan *campaign* dan edukasi serta optimalisasi media sosial selama penawaran juga sekaligus sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan literasi keuangan dan investasi bagi masyarakat. Hasilnya, setelah ditawarkan selama 27 hari mulai tanggal 3 hingga 29 Maret 2023, kedua seri Sukuk Ritel tersebut mencatatkan total pemesanan sebesar Rp21,49 triliun dari 58.472 investor, dengan total pemesanan untuk SR018T3 sebesar Rp16,95 triliun dan untuk SR018T5 sebesar Rp4,54 triliun. Total pemesanan tersebut lebih tinggi dibandingkan Sukuk Ritel yang diterbitkan pada periode awal tahun lainnya, seperti SR016 bulan Maret 2022 (Rp18,44 triliun) dan SR014 bulan Februari 2021 (Rp16,71 triliun). Selanjutnya, jika ditinjau dari tingkat keritelan, rata-rata pemesanan per investor pada penerbitan kali ini (SR018T3:

Rp354,52 juta dan SR018T5: Rp304,37 juta) mencapai tingkat keritelan yang terbaik selama penerbitan Sukuk Ritel sejak 2009.

Sementara dari jumlah investor, terdapat 47.811 investor yang berinvestasi pada SR018T3, 14.932 investor yang berinvestasi pada SR018T5, serta 4.271 investor yang berinvestasi pada keduanya. Generasi milenial masih mendominasi jumlah investor SBN Ritel, termasuk pada penerbitan SR018T3 dan SR018T5 kali ini, masing-masing mencapai 44,62 dan 55,57 persen jumlah investor. Selanjutnya, baik SR018T3 maupun SR018T5, pemesanan didominasi oleh investor di wilayah Indonesia Bagian Barat (selain DKI Jakarta) dengan jumlah investor sebanyak 27.928 orang (58,41 persen) dan volume pemesanan Rp8,008 triliun (47,25 persen) untuk SR018T3, dan 8.868 investor (59,39 persen) dan volume pemesanan Rp2,170 triliun (47,76 persen) untuk SR018T5. Jika ditinjau berdasarkan gender, investor perempuan mendominasi pemesanan SR018T3 dan SR018T5, yaitu masing-masing sebesar 56,86 persen dan 51,31 persen. Namun demikian, dari sisi volume pemesanan, SR018T3 didominasi oleh investor perempuan sebesar 50,19 persen, sedangkan SR018T5 didominasi oleh investor laki-laki sebesar 57,62 persen. Selain itu, berdasarkan Profesi, pemesanan SR018T3 dan SR018T5 didominasi oleh investor dari kalangan Pegawai Swasta yaitu sebesar 35,05 persen dan 37,98 persen, sedangkan nominal pemesanan didominasi oleh Wiraswasta masing-masing sebesar 36,72 persen dan 33,49 persen. Penerbitan Sukuk Ritel kali ini berhasil menjangkau sebanyak 18.940 investor baru dengan total volume pemesanan Rp4.423 triliun jika dibandingkan terhadap SBN Ritel. Sedangkan jika dibandingkan terhadap SBSN Ritel, jumlah investor baru mencapai 25.920 investor dengan total volume pemesanan Rp6.477 triliun. Peningkatan jumlah partisipasi masyarakat dalam penerbitan SBN Ritel ini perlu diapresiasi dan terus ditingkatkan baik melalui pengembangan instrumen, maupun komunikasi publik yang efektif untuk meningkatkan *awareness* dan literasi keuangan masyarakat.

Halaman Ini Dikosongkan

Akhir Triwulan I 2023, Penerimaan Pajak Mencapai Rp432,25 Triliun

Penerimaan Perpajakan

Realisasi penerimaan pajak pada triwulan I tahun 2023 mencapai Rp432,25 triliun. Bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak pada periode yang sama tahun sebelumnya, realisasi tersebut masih terbilang impresif, namun mengalami penurunan pertumbuhan penerimaan. Penurunan pertumbuhan penerimaan pajak periode ini, tercermin dari pertumbuhan kumulatif sampai dengan Maret 2023 yang sebesar 33,78 persen (*yoy*), lebih rendah dari Februari 2023 dengan kinerja pertumbuhan 40,35 persen (*yoy*). Kinerja pertumbuhan penerimaan pajak mengindikasikan pelemahan sejak bulan Februari 2023, namun masih melanjutkan tren *double digits*.

Setidaknya, terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan penerimaan pajak sampai dengan akhir Maret 2023. Pertama, harga komoditas yang mulai mengalami normalisasi. Kedua, aktivitas ekonomi yang mulai menunjukkan perlambatan, dan ketiga,

Pertumbuhan yoy kumulatif tahun 2022 dan 2023

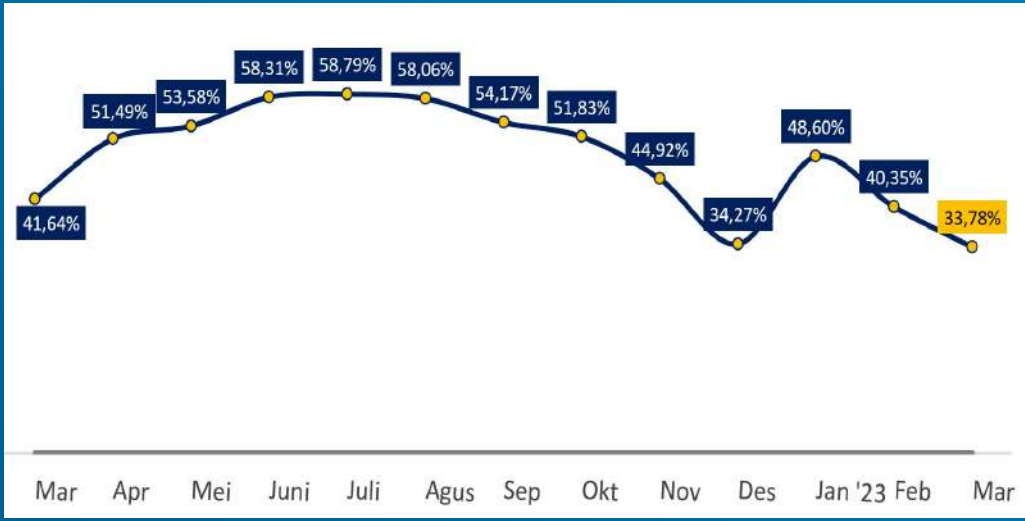

Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2023

Uraian	Target 2023 (Triliun)	Realisasi s.d. 31 Maret 2023		
		Rp (Triliun)	Δ% '22-'23	% Realisasi
Pajak Penghasilan (PPh)	935.07	243.68	28.00	26.06
- Non Migas	873.63	225.95	31.03	25.86
- Migas	61.44	17.73	-1.12	28.86
PPN & PPnBM	742.95	185.70	42.37	24.99
PBB	31.31	0.57	79.86	1.81
Pajak Lainnya	8.70	2.30	16.53	26.43
Jumlah	**1.718.03**	**432.25**	**33.78**	**25.16**

dampak dari implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Namun demikian, optimisme pergerakan ekonomi masih terus berlanjut yang terlihat dari PMI Manufaktur Indonesia yang berada pada level optimis. Pada bulan Februari 2023, PMI Manufaktur Indonesia berada pada level 51,2, sedangkan pada bulan Maret 2023, PMI Manufaktur Indonesia mengalami kenaikan menjadi 51,9 yang juga menunjukkan level optimis.

Kinerja kelompok pajak pada triwulan I 2023 terlihat menggembirakan, hampir seluruh kelompok penerimaan pajak utama, mencatatkan pertumbuhan positif dan mempertahankan kinerja memuaskannya sejak tahun lalu. Namun demikian, khusus untuk PPh Migas mengalami tekanan tipis sebesar 1,12 persen (*yoy*) pada periode ini. Perlambatan penerimaan PPh Migas merupakan dampak dari pergeseran pembayaran bagi hasil pengusahaan blok migas yang tahun lalu terjadi di bulan Januari 2022. Sedangkan kelompok PPh Non-Migas, masih tercatat tumbuh kuat mencapai 31,03 persen (*yoy*). Berikutnya, PPN dan PPnBM tumbuh sangat tinggi mencapai 79,86 persen (*yoy*) dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi masyarakat ketika memasuki bulan Ramadan. Kelompok pajak PBB dan Pajak Lainnya juga mengalami pertumbuhan positif pada periode ini.

Pertumbuhan Neto Kumulatif Mayoritas Jenis Pajak Dominan Positif

Bila dicermati lebih lanjut, kinerja seluruh jenis pajak utama secara kumulatif berhasil tumbuh positif. Pertumbuhan dengan performa terbaik terjadi pada jenis pajak dengan kontributor terbesar yaitu PPh Badan dan PPN DN. Pada jenis pajak PPh Badan, pertumbuhan kumulatif mencapai 69,57 persen (*yoy*). Sementara itu, pajak atas konsumsi yaitu PPN DN mampu tumbuh signifikan hingga 67,07 persen (*yoy*). Berikutnya, PPh Pasal 21 mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan utilisasi dan upah tenaga kerja. Sejalan dengan pertumbuhan kumulatif PPh Pasal 21, penerimaan PPh Orang Pribadi (OP) juga meningkat. Peningkatan penerimaan pajak dari PPh OP merupakan dampak dari jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan OP yang berakhir di tanggal 31 Maret 2023.

Selanjutnya, pajak-pajak atas impor yaitu PPh Pasal 22 Impor, PPN Impor dan PPnBM Impor tumbuh secara kumulatif masing-masing 2,40 persen (*yoy*),

Penerimaan Jenis-Jenis Pajak Utama

Jenis Pajak	Realisasi s.d. 31 Maret 2023 (Rp Triliun)
PPh Pasal 21	49.92
PPh Pasal 25/29	90.19
- Orang Pribadi	7.87
- Badan	82.32
PPh Pasal 26	15.20
PPh Final	29.03
PPN Dalam Negeri	114.07
Pajak atas Impor	82.78
- PPh 22 Impor	18.59
- PPN Impor	63.01
- PPnBM Impor	1.19

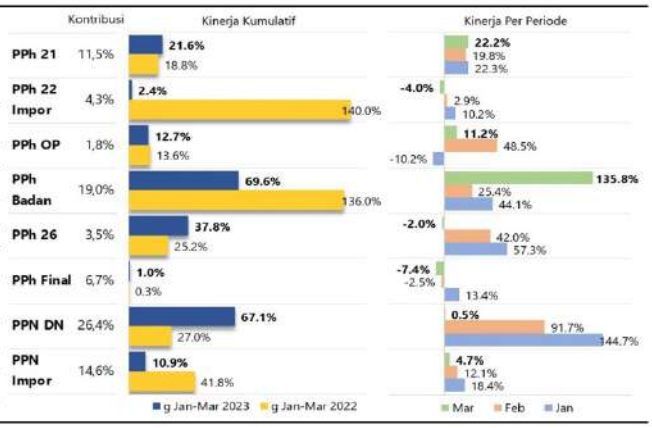

Penerimaan Pajak Sektoral

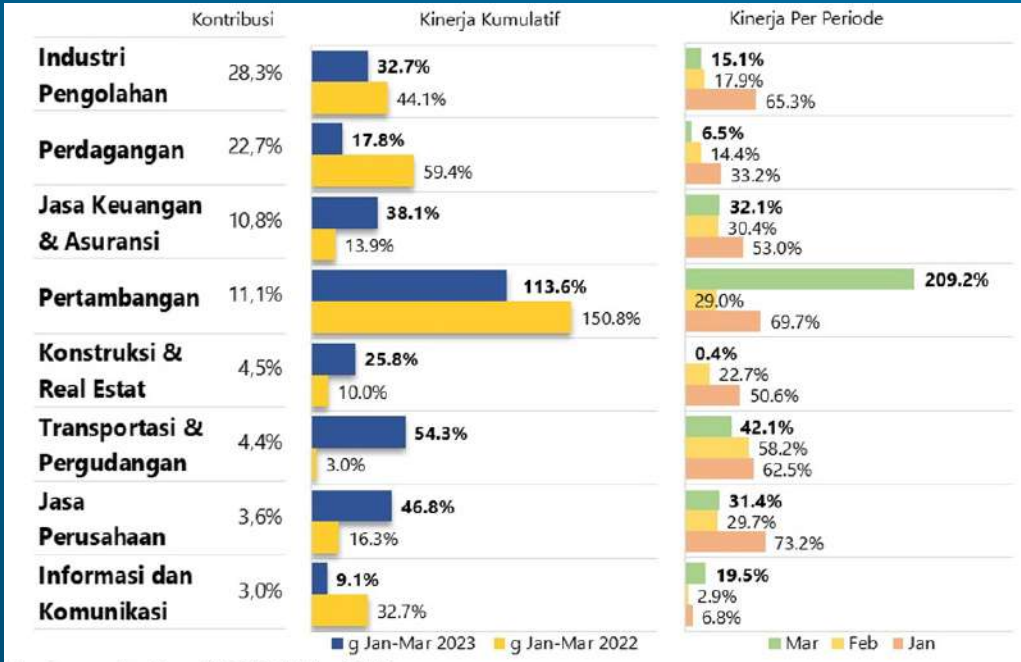

Penerimaan sektoral tanpa PPS, DTP, PBB, dan PPh Migas
**Sumber: Aplikasi Portal DJP dan Dashboard Penerimaan tanggal 2 April 2023*

10,93 persen (*yoy*), dan 59,68 persen (*yoy*). Kinerja pajak-pajak atas impor mengalami perlambatan seiring dengan melemahnya aktivitas impor. Demikian pula dengan PPh Final dan PPh Pasal 26, kedua jenis pajak ini mencatatkan pertumbuhan kumulatif positif, namun khusus untuk PPh Final, kinerja pertumbuhan hanya naik tipis karena adanya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang berlangsung pada tahun lalu dan tidak terulang kembali pada tahun ini.

Secara bulanan, kinerja pertumbuhan menunjukkan tingkatan yang dinamis. Pertumbuhan penerimaan PPh Badan pada Maret 2023 mencapai 135,78 persen (*yoy*). Tingginya pertumbuhan jenis pajak ini, merupakan akibat dari beberapa Wajib Pajak Sektor Pertambangan yang menyetorkan PPh Tahunannya lebih awal. Sebaliknya, kinerja PPN DN melambat secara signifikan sebesar 0,46 persen (*yoy*). Perlambatan dari pertumbuhan pajak atas konsumsi ini terjadi akibat dari pergeseran penerimaan pajak pada tiga hari terakhir bulan Februari 2022 (hari libur Isra Mi'raj) ke Maret 2022. Apabila dampak pergeseran penerimaan pajak ini dihilangkan, pertumbuhan pada bulan Februari 2023 dan Maret 2023 masing-masing sebesar 45,99 persen (*yoy*) dan 24,58 persen (*yoy*). Selanjutnya, pertumbuhan bulanan PPh Pasal 21 masih selaras dengan pertumbuhan kumulatifnya dengan capaian 22,20 persen (*yoy*). Begitu pula dengan PPh OP yang pada bulan Maret 2023 juga tumbuh menguat 11,16 persen (*yoy*).

Berikutnya, kinerja bulanan pajak-pajak atas impor pada Maret 2023 mengalami perlambatan. Namun demikian, khusus untuk PPnBM Impor mengalami pertumbuhan bulanan yang signifikan hingga 78,57 persen (*yoy*). Kinerja PPnBM Impor yang meningkat menandakan bahwa terjadi peningkatan penjualan pada barang yang tergolong mewah di Indonesia. Terakhir, jenis pajak PPh Final dan PPh Pasal 26 mengalami tekanan pertumbuhan bulanan. Tekanan yang terjadi pada PPh Pasal 26 merupakan dampak dari penurunan pembayaran dividen ke luar negeri.

Pertumbuhan Penerimaan Neto Seluruh Sektor Utama Positif

Secara kumulatif, penerimaan pada seluruh sektor utama mencatatkan pertumbuhan positif. Dua sektor utama dengan kontribusi penerimaan terbesar yaitu Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan mengalami

pertumbuhan yang baik, namun tidak sekuat periode sebelumnya. Sektor Industri Pengolahan sampai dengan akhir triwulan I 2023 mampu tumbuh 32,67 persen (*yoy*). Pertumbuhan penerimaan pada Sektor Industri Pengolahan ditopang oleh Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi dan Industri Pengolahan Tembakau. Beriringan dengan Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan juga mampu tumbuh positif 17,82 persen (*yoy*). Pertumbuhan penerimaan pada Sektor Perdagangan utamanya berasal dari Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak dan Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya. Di sisi lain, Sektor Pertambangan masih melanjutkan kinerja positifnya dengan laju pertumbuhan mencapai 113,55 persen (*yoy*). Baiknya kinerja dari Sektor Pertambangan merupakan kontribusi yang besar dari pertumbuhan penerimaan kelompok usaha Pertambangan Gas Alam dan Panas Bumi serta Pertambangan Batu Bara.

Selain sektor yang telah disebutkan sebelumnya, sektor lainnya yang juga mengalami kinerja positif pada triwulan I 2023 adalah Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi. Penerimaan Pajak Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi mampu tumbuh sebesar 38,15 persen (*yoy*) pada periode ini. Pertumbuhan penerimaan sektor tersebut utamanya disebabkan oleh tingginya kontribusi dari Perbankan Konvensional dan Pinjaman Kredit Lainnya. Selanjutnya, penerimaan Sektor Konstruksi dan *Real Estate* tumbuh 25,75 persen (*yoy*), dengan kontribusi terbesar dari Konstruksi Gedung dan Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya. Sementara itu, Sektor Transportasi dan Pergudangan mampu tumbuh 54,32 persen (*yoy*) ditopang oleh Angkutan Laut dan Jasa Penunjang Angkutan. Sedangkan sektor lainnya dengan kontribusi tidak lebih dari 4 (empat) persen yaitu Sektor Jasa Perusahaan dan Sektor Informasi dan Komunikasi juga masih mampu tumbuh positif pada periode sampai dengan Maret 2023.

Secara bulanan, laju pertumbuhan penerimaan sektor utama masih bervariasi, namun didominasi oleh pertumbuhan positif. Beberapa sektor utama yang mengalami pertumbuhan penerimaan relatif stabil adalah Sektor Industri Pengolahan, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Sektor Transportasi dan Pergudangan, dan Sektor Jasa Perusahaan. Adapun pertumbuhan bulanan dari

masing-masing sektor tersebut adalah 15,14 persen (*yoy*), 32,11 persen (*yoy*), 42,14 persen (*yoy*), dan 31,40 persen (*yoy*). Di sisi lain, Sektor Perdagangan mengalami perlambatan pertumbuhan bulanan 6,46 persen (*yoy*) akibat dari penurunan setoran PPN DN dan peningkatan restitusi. Sedangkan tingginya pertumbuhan Sektor Pertambangan sebesar 209,15 persen (*yoy*) merupakan andil beberapa Wajib Pajak besar yang menyetorkan PPh Badan tahunannya lebih awal.

Selanjutnya, Sektor Jasa Konstruksi dan Real Estate menunjukkan perlambatan pertumbuhan bulanan sebesar 0,35 persen (*yoy*). Perlambatan ini terjadi karena perubahan model pemungutan PPN atas transaksi dengan Pemerintah. Pertumbuhan yang masih kuat pada Sektor Jasa Konstruksi dan *Real Estate* di bulan Januari 2023 dan Februari 2023 didorong oleh pergeseran pembayaran dan penurunan restitusi. Terakhir, Sektor Informasi dan Komunikasi mengalami peningkatan pertumbuhan bulanan 19,49 persen (*yoy*) karena didorong menguatnya setoran PPh Final.

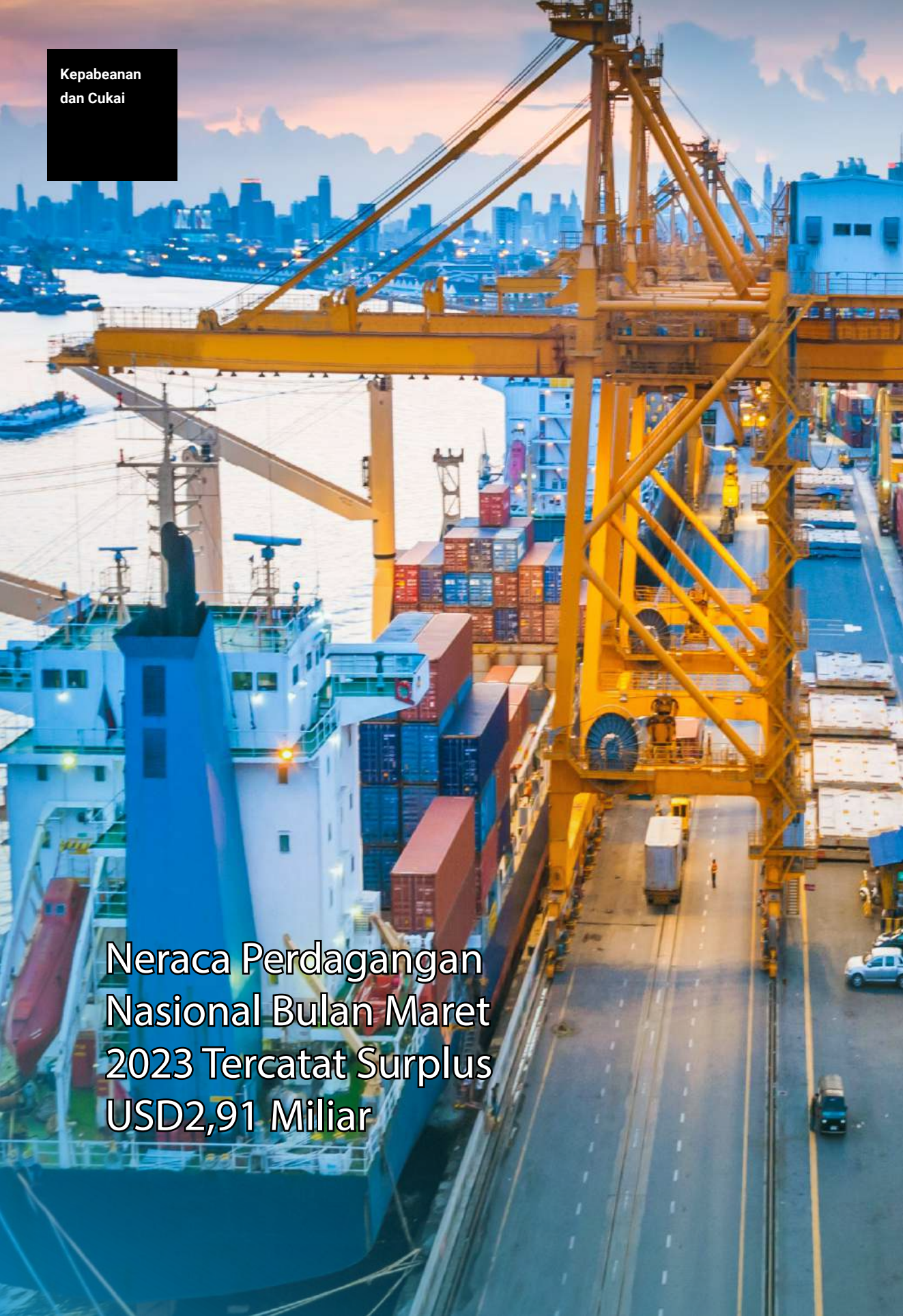

Neraca Perdagangan Nasional Bulan Maret 2023 Tercatat Surplus USD2,91 Miliar

Kepabeanan dan Cukai

Neraca Perdagangan (NP) Indonesia masih menunjukkan kinerja yang memuaskan. Surplus tercatat mencapai USD2,91 miliar dan melanjutkan rentetan surplus sejak Juni 2020. Namun demikian surplus ini menurun (*yoy*) sejalan dengan kinerja ekspor yang terkontraksi. Sehingga secara akumulatif, surplus NP hingga Maret 2023 telah mencapai USD12,25 miliar.

Surplus terjadi pada neraca nonmigas dan defisit pada neraca migas. Neraca nonmigas masih mencatatkan surplus dengan ditopang kinerja ekspor komoditas SDA terutama batubara dan produk kelapa sawit, serta kinerja sektor manufaktur berupa olahan logam, perhiasan, dan bahan kimia. Sedangkan dari sisi neraca migas, defisit masih berlanjut terutama dikontribusikan oleh impor bensin dan minyak bumi.

Meskipun neraca nasional masih surplus, namun dampak berakhirnya *Commodity Boom* mulai terlihat pada kinerja

Neraca Perdagangan 2020-2023

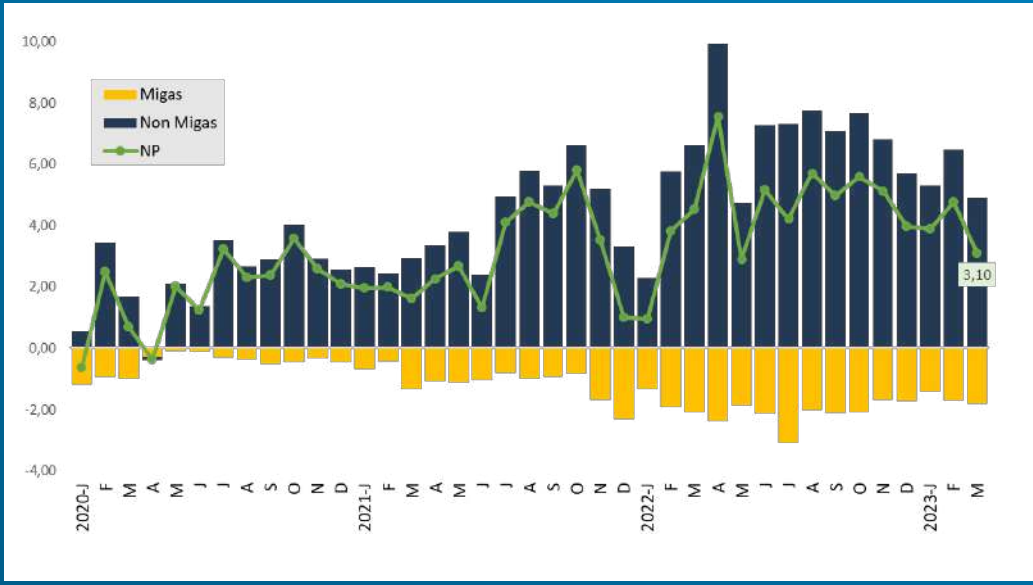

Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

No.	Jenis Penerimaan	Target APBN	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Growth (y-o-y, %) 2022	Growth (y-o-y, %) 2023	% Capaian
1	BEA MASUK	47,53	11,30	12,30	39,25%	8,84%	25,87%
2	CUKAI	245,45	57,32	56,90	15,64%	-0,72%	23,18%
	Hasil Tembakau	232,59	55,65	55,24	15,39%	-0,74%	23,75%
	Ethil Alkohol	0,14	0,04	0,03	38,14%	-20,88%	20,59%
	MMEA	8,67	1,60	1,61	25,15%	0,58%	18,61%
	Denda Adm. Cukai	-	0,02	0,02	15,22%	-8,96%	-
	Cukai Lainnya	-	0,01	0,01	-32,11%	-15,42%	-
	Plastik & MBDK	4,06	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3	BEA KELUAR	10,21	10,70	3,03	132,22%	-71,66%	29,70%
	TOTAL	303,19	79,32	72,24	27,34%	-8,93%	23,83%
	PPN Impor		56,80	63,01	41,84%	10,93%	
	PPn BM Impor		0,74	1,19	11,42%	59,68%	
	PPh Pasal 22 Impor		18,16	18,59	140,02%	2,40%	
	Total PDRI lainnya		75,70	82,78	56,81%	9,36%	
	TOTAL DJBC + PERPAJAKAN		155,01	155,02	40,21%	0,00%	

(dalam triliun Rupiah)
Sumber: DJPB 2 April 2023

perdagangan Indonesia. Kinerja ekspor maupun impor mulai menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Hal ini terlihat pada pertumbuhan ekspor dan impor pada bulan Maret yang mulai menunjukkan angka negatif.

Kinerja ekspor terkontraksi 11,33 persen (*yoy*) dan terjadi pada sektor migas maupun nonmigas. Kinerja sektor nonmigas mulai mengalami penurunan, kali ini mencapai 11,70 persen (*yoy*). Penurunan terbesar berasal dari minyak goreng kelapa sawit dan batubara yang masing-masing turun sebesar 33,36 persen (*yoy*) dan 10,41 persen (*yoy*). Lebih lanjut, ekspor dari sektor migas juga mengalami penurunan sebesar 4,76 persen (*yoy*). Kinerja tersebut disebabkan penurunan volume ekspor gas alam ke Singapura dan Jepang diikuti penurunan ekspor minyak bitumen ke Singapura dan Hongkong.

Hal yang sama juga terjadi pada impor, kinerjanya mulai tertekan, turun 6,26 persen (*yoy*) dan terjadi pada sektor migas maupun nonmigas. Impor migas turun 13,67 persen (*yoy*) dipengaruhi komoditas bensin dan solar. Hal ini tidak lepas dari pengaruh harga minyak dunia dan gas alam per Maret 2023 yang melemah dibandingkan tahun sebelumnya seiring berkurangnya permintaan global. Sedangkan impor nonmigas menurun 4,86 persen (*yoy*) karena melemahnya importasi gula, bahan baku plastik, serta besi dan baja dasar.

Capaian Kepabeanan dan Cukai hingga Maret 2023 telah mencapai 23,83 persen Targetnya.

Hingga tanggal 31 Maret 2023, realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp72,24 triliun atau 23,83 persen dari Target. Penerimaan total menurun 8,93 persen (*yoy*) meskipun Penerimaan BM masih tumbuh. Penurunan pada bulan ini terjadi pada Penerimaan BK akibat harga CPO yang sudah termoderasi dan Penerimaan Cukai akibat penurunan produksi HT.

Namun demikian realisasi atas Penerimaan PDRI lainnya masih menunjukkan kinerja yang memuaskan, mencapai Rp82,78 triliun atau tumbuh 9,36 persen (*yoy*). Sehingga total Penerimaan Negara yang telah dikumpulkan dari Kepabeanan dan Cukai serta PDRI lainnya mencapai Rp155,02 triliun atau menyamai kinerja tahun 2022.

Dari sisi Penerimaan BM, kinerja positif masih berlanjut dengan capaian 25,87 persen

dari Target atau tumbuh 8,84 persen (*yoy*) menjadi Rp12,30 triliun. Peningkatan penerimaan pada bulan ini disebabkan pelemahan kurs rupiah dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu serta *extra effort* berupa surat penetapan pabean yang cukup signifikan senilai Rp227 miliar pada bulan Januari 2023. Dari sisi komoditas pertumbuhan BM terbesar berasal dari kendaraan, suku cadang kendaraan, serta importasi dari barang modal berupa mesin untuk keperluan penambangan, penggalian dan konstruksi.

Penerimaan BK mencapai Rp3,03 triliun atau 29,70 persen dari Target. Kinerja ini mengalami penurunan yang signifikan sebesar 71,66 persen (*yoy*). Penurunan tersebut dipengaruhi harga CPO yang lebih rendah dan turunnya volume ekspor komoditas mineral. Penerimaan BK dari komoditas kelapa sawit turun 72,59 persen (*yoy*), mengikuti harga referensi CPO yang turun. Misalnya, harga referensi CPO pada bulan Maret 2022 mencapai USD1.432/MT turun menjadi USD911/MT pada Maret 2023. Kemudian BK dari tembaga mengalami penurunan sebesar 69,84 persen (*yoy*) terjadi akibat penurunan volume ekspor dan penyesuaian tarif BK tembaga dari 5,00 persen menjadi 2,50 persen. Dikuti BK dari bauksit yang juga turun 71,14 persen akibat penurunan volume ekspornya.

Cukai merupakan mesin utama penerimaan Kepabeanan dan Cukai, penerimaannya mencapai Rp56,90 triliun atau 23,18 persen dari Target. Kinerja penerimaan ini sedikit menunjukkan pelemahan dengan penurunan sebesar 0,72 persen (*yoy*). Penurunan penerimaan Cukai terutama terjadi pada CHT dan EA karena efek penurunan produksinya. Sedangkan penerimaan MMEA masih tumbuh meskipun tipis.

Penerimaan CHT turun tipis 0,74 persen (*yoy*), menjadi Rp55,24 triliun atau 23,75 persen dari Target. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya pemesanan pita cukai bulan November 2022 hingga Januari 2023 yang pelunasannya terjadi pada kuartal I 2023. Tentu saja penurunan kinerja ini masih turut dipengaruhi pola bulanan penerimaan CHT yang cenderung fluktuatif terutama pada awal tahun. Namun penerimaan Cukai diharapkan masih akan kembali tumbuh seiring dengan peningkatan tarif CHT.

Meskipun penerimaan didorong untuk tetap meningkat, namun produksi batang rokok akan tetap mengalami penurunan.

Hal ini sejalan dengan fungsi Cukai untuk membatasi peredaran barang tertentu. Berdasarkan pembahasan kebijakan tarif CHT tahun 2023, dengan rata-rata tertimbang kenaikan tarif CHT sebesar 10 persen, produksi sigaret di tahun 2023 diproyeksikan tetap menurun.

Penerimaan Cukai MMEA masih mengalami pertumbuhan meskipun tipis sebesar 0,58 persen (*yoy*) menjadi Rp1,61 triliun, sehingga Penerimaan Cukai MMEA mencapai 18,61 persen dari Target. Faktor utama pendukung kinerja tersebut adalah produksi MMEA, terutama dalam negeri. Sedangkan berdasarkan kadar alkoholnya peningkatan hanya terjadi pada golongan A. MMEA golongan A merupakan minuman dengan kadar alkohol terendah, dengan maksimal kandungan sebanyak 5 persen. MMEA tersebut juga memiliki volume peredaran terbesar di Pasar Indonesia dengan porsi sekitar 60 persen.

Dari sisi Penerimaan Cukai EA, kinerjanya mengalami penurunan 20,88 persen (*yoy*) menjadi Rp0,03 triliun atau 20,59 persen dari Target. Kinerja Penerimaan EA turun karena sebagian besar diberikan fasilitas tidak dipungut atau pembebasan untuk keperluan medis atau bahan baku barang yang tidak dikenai Cukai. Dilihat dari nilai penerimaannya, sebenarnya kinerja Cukai EA masih berada pada pola normal. Sepanjang 2022 penerimaan rata-rata Cukai EA sebesar Rp0,01 triliun per bulan.

Formula Baru HBA Mendorong Rasa Keadilan dan Tambahan Potensi Pendapatan SDA Nonmigas

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pelambatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara besar mulai berdampak pada menurunnya pertumbuhan pendapatan negara nasional. *International Monetary Fund* (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat dari 3,4 persen pada tahun 2022 menjadi 2,9 persen pada tahun 2023.

Meski realisasi PNBP hingga 31 Maret 2023 tumbuh 43,75 persen (*yoy*), tetapi menurun signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan PNBP bulan Februari 2023 yang tumbuh 86,61 persen (*yoy*). Penurunan pertumbuhan tersebut terjadi pada seluruh jenis PNBP. Tren penurunan tersebut terjadi sejak bulan Januari 2023 sehingga semua pihak perlu meningkatkan kewaspadaan menyikapi kondisi dimaksud.

Realisasi PNBP hingga 31 Maret 2023 mencapai Rp142,66 triliun atau 32,32 persen dari Target. Pertumbuhan realisasi bulan Maret 2023 ini lebih tinggi 12,00 persen (*yoy*). Hingga

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP (Miliar Rupiah)	APBN 2023	Realisasi s.d. 31 Maret 2023	% APBN	% Growth (YoY)
Penerimaan Negara Bukan Pajak	**441.391,81**	**142.656,29**	**32,32**	**43,75**
A Pendapatan SDA	**195.975,38**	**75.563,54**	**38,56**	**58,62**
1 Migas	**131.169,39**	**31.282,67**	**23,85**	**(3,98)**
a Minyak Bumi	96.137,04	31.282,67	32,54	(3,98)
b Gas Bumi	35.032,35	-	-	-
2 Nonmigas	**64.805,99**	**44.280,87**	**68,33**	**194,04**
a Pendapatan Pertambangan Minerba	54.030,12	42.927,76	79,45	219,89
b Pendapatan Kehutanan	5.161,67	1.094,17	21,20	12,98
c Pendapatan Perikanan	3.500,00	8,68	0,25	(97,87)
d Pendapatan Panas Bumi	2.114,20	250,25	11,84	(5,11)
B Pendapatan KND	**49.100,00**	**4.595,32**	**9,36**	**3.120,02**
C Pendapatan PNBP Lainnya	**113.300,04**	**44.311,61**	**39,11**	**30,21**
D Pendapatan BLU	**83.016,39**	**18.185,83**	**21,91**	**4,35**

akhir Maret 2023, mayoritas jenis PNBP masih tumbuh positif kecuali Pendapatan SDA Migas.

Pendapatan SDA hingga 31 Maret 2023 mencapai Rp75,56 triliun atau tumbuh 58,62 persen (*yoy*). Kinerja positif ini utamanya ditopang dari kenaikan kurs serta masih tingginya harga mineral dan batubara di pasaran. Namun demikian, pertumbuhan SDA Migas terkontraksi 3,98 persen (*yoy*). Pendapatan SDA Migas mengalami kontraksi disebabkan penurunan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan *lifting* minyak bumi. Rata-rata ICP bulan Desember 2022 hingga Februari 2023 mengalami penurunan 8,64 persen, sedangkan *lifting* minyak bumi menurun 2,46 persen. Adapun *lifting* gas bumi tumbuh 0,71 persen.

Pendapatan SDA Nonmigas masih tumbuh signifikan 194,04 persen (*yoy*). Capaian ini sudah 68,33 persen dari Target. Pertumbuhan ini utamanya disumbang dari iuran produksi/royalti batubara dan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Faktor peningkatan harga mineral dan batubara penyumbang utama atas kenaikan royalti ini. Rata-rata bulan Januari sampai dengan Maret 2023, Harga Batubara Acuan (HBA) meningkat 57,17 persen dan Harga Mineral Acuan (HMA) Nikel naik 29,22 persen.

Pada bulan Maret 2023 terjadi perubahan formula baru penentuan HBA. Pemerintah melalui Kementerian ESDM menetapkan formula baru dalam penentuan HBA dengan membaginya ke dalam tiga kelompok. Perubahan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 41.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komoditas Batubara. Berdasarkan ketentuan terbaru tersebut, Kementerian ESDM menetapkan HBA Maret 2023 yang didapat dari rata-rata realisasi harga jual batubara 2 bulan sebelumnya, dengan proporsi 70 persen dari realisasi harga 1 bulan sebelumnya dan 30 persen dari realisasi harga 2 bulan sebelumnya.

Dengan formula baru tersebut, HBA pada Maret dibagi menjadi tiga kelompok, yakni (1). HBA dalam kesetaraan nilai kalor 6.322 kcal/kg GAR ditetapkan pada angka USD283,08 per ton,

(2). HBA I dalam kesetaraan nilai kalor 5.200 kcal/kg GAR ditetapkan pada angka USD136,70 per ton, dan (3). HBA

II dalam kesetaraan nilai kalor 4.200 kcal/kg GAR ditetapkan pada angka USD102,26 per ton. Formula baru penetapan HBA pada prinsipnya bertujuan untuk mendapatkan harga batubara acuan yang dapat diterima oleh pasar dengan mempertimbangkan penerimaan negara.

Pendapatan SDA Nonmigas bulan Maret 2023 sektor Kehutanan tumbuh 12,98 persen (*yoy*). Kenaikan ini utamanya berasal dari kenaikan produksi kayu bulat. Adapun sektor Perikanan mengalami kontraksi 97,87 persen (*yoy*). Kontraksi ini disebabkan perubahan mekanisme pemungutan PNBP Perikanan. Sebelumnya menggunakan metode perhitungan PNBP Pungutan Hasil Perikanan (PHP) Praproduksi menjadi Pascaproduksi dimana Wajib Bayar akan dihitung PNBP nya pada saat mendaratkan ikan. Rata-rata operasional kapal penangkap ikan berlayar selama 2-3 bulan sehingga masih sangat sedikit kapal yang mendapatkan ikan hingga akhir Maret 2023. Diperkirakan tren kenaikan PNBP SDA Perikanan akan mulai meningkatkan pada bulan Mei 2023 sejalan dengan perbaikan tata kelola dan proses verifikasi. Selanjutnya, sektor Panas Bumi juga mengalami kontraksi 5,11 persen (*yoy*). Penurunan ini disebabkan pada bulan Maret 2023 tidak terdapat penerimaan kurang bayar berdasarkan hasil audit. Namun demikian, untuk iuran tetap dan iuran produksi panas bumi menunjukan adanya peningkatan penerimaan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Realisasi Pendapatan KND sampai dengan bulan Maret 2023 telah mencapai Rp4,59 triliun atau 9,36 persen dari Target. Capaian ini tumbuh 3.120,02 persen (*yoy*). Pendapatan ini berasal dari setoran dividen interim salah satu BUMN Perbankan (Himbara) untuk tahun buku 2022.

Capaian realisasi PNBP Lainnya mengalami pertumbuhan trend positif sampai dengan bulan Maret 2023 mencapai Rp44,31 triliun atau 39,11 persen dari Target. Capaian ini meningkat 30,21 persen (*yoy*). Peningkatan realisasi PNBP Lainnya terutama ditopang dari pendapatan Penjualan Hasil Tambang (PHT) dan pendapatan PNBP dari beberapa K/L (termasuk BUN).

Pendapatan PHT mencapai Rp14,22 triliun atau tumbuh 65,80 persen (*yoy*) sebagai dampak kenaikan HBA. Adapun pendapatan PNBP dari K/L mencapai Rp30,09 triliun atau

tumbuh 18,22 persen (*yoy*) terutama disumbang dari pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia, pendapatan penggunaan spektrum frekuensi radio, pendapatan hasil lelang tindak pidana korupsi, dan pendapatan pelayanan administrasi hukum.

Pendapatan BLU sampai dengan bulan Maret 2023 mencapai Rp18,19 triliun atau mencapai 21,91 persen dari Target. Realisasi PNBP BLU ini tumbuh 4,35 persen (*yoy*). Kenaikan ini terutama berasal dari pendapatan jasa pelayanan pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri di beberapa K/L.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Utamanya untuk Pemenuhan Kewajiban Pemerintah serta Bantuan kepada Masyarakat

Belanja Pemerintah Pusat

Realisasai BPP mencapai Rp347,27 triliun (15,46 persen terhadap Pagu). Realisasi BPP utamanya pada Belanja Barang yang antara lain dimanfaatkan untuk pelaksanaan program di bidang pendidikan, pertahanan dan keamanan, serta kesehatan, dengan pertumbuhan realisasi Belanja Barang mencapai 36,32 persen (*yoy*). Selain itu, realisasi BPP juga dipengaruhi oleh penyelesaian kewajiban pemerintah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pembayaran pensiun.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2023 (dalam triliun)

Belanja K/L

Realisasi Belanja K/L mencapai Rp166,93 triliun atau 16,68 persen dari Pagu. Realisasi Belanja K/L utamanya dimanfaatkan untuk penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), penyaluran PKH dan Kartu Sembako; penyaluran bantuan iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); bantuan bencana; pembangunan bendungan;

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2023

Belanja Pemerintah Pusat	APBN	Realisasi Maret	% thd APBN	Growth (%)
Belanja K/L	1.000,84	166,93	16,68	11,30
Belanja Pegawai	272,92	49,51	18,14	(1,61)
Belanja Barang	375,17	58,04	15,47	36,32
Belanja Modal	209,19	23,47	11,22	25,30
Bantuan Sosial	143,57	35,91	25,01	(6,36)
Belanja Non-K/L	1.245,61	180,34	14,48	9,81
a.l. Belanja Pegawai	169,62	41,70	24,58	4,79
Subsidi	298,50	37,54	12,57	(2,54)
Total	**2.246,46**	**347,27**	**15,46**	**10,52**

(dalam triliun Rupiah)

pembangunan jaringan irigasi; pengadaan peralatan/mesin; pemeliharaan jalan; dan operasional K/L.

Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp49,51 triliun atau 18,14 persen dari Pagu. Realisasi Belanja Pegawai tersebut digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN/TNI/POLRI. Realisasi tersebut turun sebesar 1,61 persen (*yoy*).

Belanja Barang terealisasi sebesar Rp58,04 triliun atau 15,47 persen dari Pagu. Realisasi Belanja Barang tersebut mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 36,32 persen (*yoy*). Peningkatan tersebut memberikan indikasi yang sangat baik bagi kinerja anggaran Pemerintah pada Triwulan I 2023, yang dimanfaatkan antara lain untuk : (1) penyaluran dana BOS Kementerian Agama (Kemenag); (2) pemeliharaan BMN pada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dalam rangka mendukung alat sistem pertahanan pada Matra Darat, Matra Laut, Matra Udara dan Integratif; (3) pengadaan logistik dan pelayanan kesehatan pada Kepolisian Republik Indonesia (POLRI); (4) penyediaan rumah layak huni dan pemeliharaan jalan nasional pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR); dan (5) pelayanan kesehatan pada unit pelayanan teknis Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Realisasi Belanja Modal mencapai Rp23,47 triliun atau 11,22 persen dari Pagu. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 25,30 persen (*yoy*). Kinerja realisasi Belanja Modal dipengaruhi antara lain oleh : (1) Belanja Modal peralatan dan mesin dengan pemanfaatan antara lain pengadaan alat material khusus (almatsus) oleh POLRI, dan pengadaan alat utama sistem senjata TNI (alutsista) pada Kemenhan; (2) Belanja Modal jalan, irigasi, dan jaringan dengan pemanfaatan antara lain untuk pembangunan bendungan, jaringan irigasi, dan preservasi jalan dan jembatan oleh KemenPUPR, serta pembangunan prasarana perkeretaapian, bandar udara dan fasilitas pelabuhan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub); (3) realisasi Belanja Modal gedung dan bangunan dengan pemanfaatan antara lain pembangunan gedung kantor Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) oleh KemenPUPR, terminal kendaraan dan gedung Akademik Pelayaran pada Kemenhub, dan Rusun prajurit TNI & POLRI.

Realisasi Belanja 15 Kementerian/Lembaga Dengan Pagu Terbesar s.d 31 Maret TA 2022-2023 (dalam triliun Rupiah)

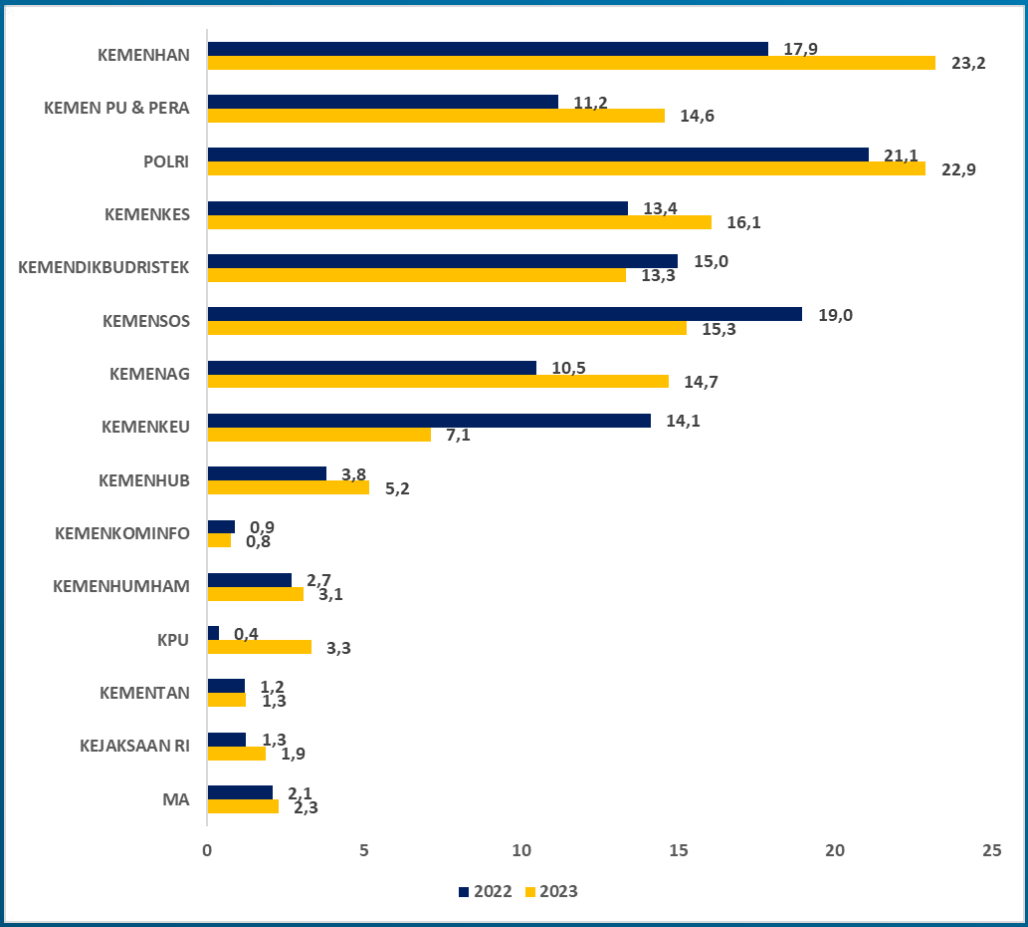

Realisasi Belanja Bantuan Sosial (Bansos) mencapai Rp35,91 triliun atau 25,01 persen dari Pagu. Realisasi Bansos tersebut terkontraksi 6,36 persen (*yoy*). Realisasi Bansos tersebut dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan iuran bagi 96,7 juta PBI Program JKN untuk bulan Januari hingga Maret oleh Kemenkes, Bantuan Pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kemenag, bantuan PKH kepada 9,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bantuan Program Kartu Sembako kepada 17,4 juta KPM, serta bantuan kebencanaan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan bantuan stimulan rumah rusak akibat gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dari perspektif organisasi, realisasi Belanja K/L pada 15 K/L dengan pagu terbesar yang mewakili 86,87 persen dari total realisasi Belanja K/L. Realisasi tersebut utamanya didorong antara lain oleh realisasi anggaran pada Kemenhan, POLRI, Kemenkes, dan Kemensos.

Belanja Non-K/L

Realisasi Belanja Non-K/L mencapai Rp180,34 triliun atau 14,48 persen dari Pagu. Realisasi tersebut utamanya digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun dan penyaluran subsidi. Belanja Pegawai Non-K/L terealisasi sebesar Rp41,70 triliun atau 24,58 persen dari Pagu, antara lain digunakan untuk pemenuhan kewajiban Pemerintah terhadap para pensiunan ASN/TNI/POLRI sebesar Rp39,0 triliun serta pembayaran iuran Jaminan Kesehatan aparatur negara sebesar Rp2,5 triliun.

Realisasi Belanja Subsidi sampai dengan 31 Maret 2023 mencapai Rp37,54 triliun, atau 12,57 persen dari Pagu dan turun sebesar 2,54 persen (*yoy*). Realisasi tersebut terdiri atas: (a) Subsidi Energi sebesar Rp24,49 triliun, mencakup Subsidi BBM, Subsidi LPG Tabung 3 Kg, dan Subsidi Listrik; dan (b) Subsidi NonEnergi sebesar Rp13,05 triliun, mencakup Subsidi Bunga Kredit Program dan Subsidi PSO. Realisasi pembayaran Subsidi Energi tersebut untuk penyaluran BBM bersubsidi (minyak tanah) sebesar 80,33 ribu KL, LPG Tabung 3 Kg sebesar 1,29 juta MT, pelanggan listrik bersubsidi sejumlah 39,10 juta pelanggan, dan volume konsumsi listrik bersubsidi sebesar 10,24 TWh. Selanjutnya, realisasi Subsidi NonEnergi meliputi antara lain

Capaian Output Strategis Bidang Kesehatan, Ketahanan Pangan, Perlindungan Sosial, Pendidikan, dan Infrastruktur s.d. Triwulan I (per 31 Maret 2023)

BIDANG KESEHATAN, a.l.:
Penyaluran PBI JKN bagi **96,7 juta jiwa** peserta PBI
Pemeriksaan **1.816 sampel makanan** oleh BPOM
Layanan Kesehatan RS TNI Polri

BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL, a.l.:
Peyaluran Bantuan PKH kepada **9,6 juta KPM**
Penyaluran Kartu Sembako kepada **17,4 juta KPM**
Pemberian KIP Kuliah kepada **691,1 rb Mahasiswa**
Bantuan Stimulan Perumahan (Bencana Cianjur) untuk **42,4 ribu rumah**

BIDANG KETAHANAN PANGAN, a.l.:
Bantuan Benih, Mulsa, dan Pupuk Organik untuk **53.550 unit** equivalen Ha
Bantuan Alat dan Mesin Pertanian **120 Traktor** dan **100 Cultivator**
Bantuan Ternak Potong **703 ekor**
Bantuan Benih Ikan, Kepiting, dan Udang **28,3 juta ekor**
Bendungan **(progress 22,6%)** dan jaringan irigasi **(progress 13,3%)**

BIDANG PENDIDIKAN, a.l.:
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk **3,6 juta siswa**
Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS kepada **42,100 guru**
Bantuan Pendidikan PIP (SD s/d SMA) kepada **6,5 juta siswa**
Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk **192 PTN**

BIDANG INFRASTRUKTUR, a.l.:
Pembangunan & Preservasi Jalan **(Progress 11,7%)** dan Jembatan **(Progress 10,0%)**
Pembangunan dan peningkatan Jalur Kereta Api **(Progress 12,2%)**
Pembangunan dan Pengembangan Bandara **(Progress 16,8%)**
Pengembangan dan Rehabilitasi Pelabuhan Laut **44 lokasi**
Pembangunan/peningkatan/perluasan SPAM **(Progress 16,3%)**
Rehabilitasi prasarana pendidikan dasar, menengah, dan tinggi **(Progress 21,2%)**

penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 1,89 juta ton, Subsidi Bunga KUR diberikan kepada 0,50 juta debitur dengan total penyaluran KUR mencapai Rp30,31 triliun, dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan untuk 37,14 ribu unit rumah.

Realisasi Belanja Lain-Lain sampai dengan 31 Maret 2023 mencapai Rp694,84 miliar atau 0,21 persen dari Pagu. Realisasi tersebut dimanfaatkan di antaranya untuk Program Kartu Prakerja sebesar Rp249,42 miliar, terutama untuk biaya pelatihan dan insentif peserta sebesar Rp221,21 miliar bagi 60,00 ribu orang peserta.

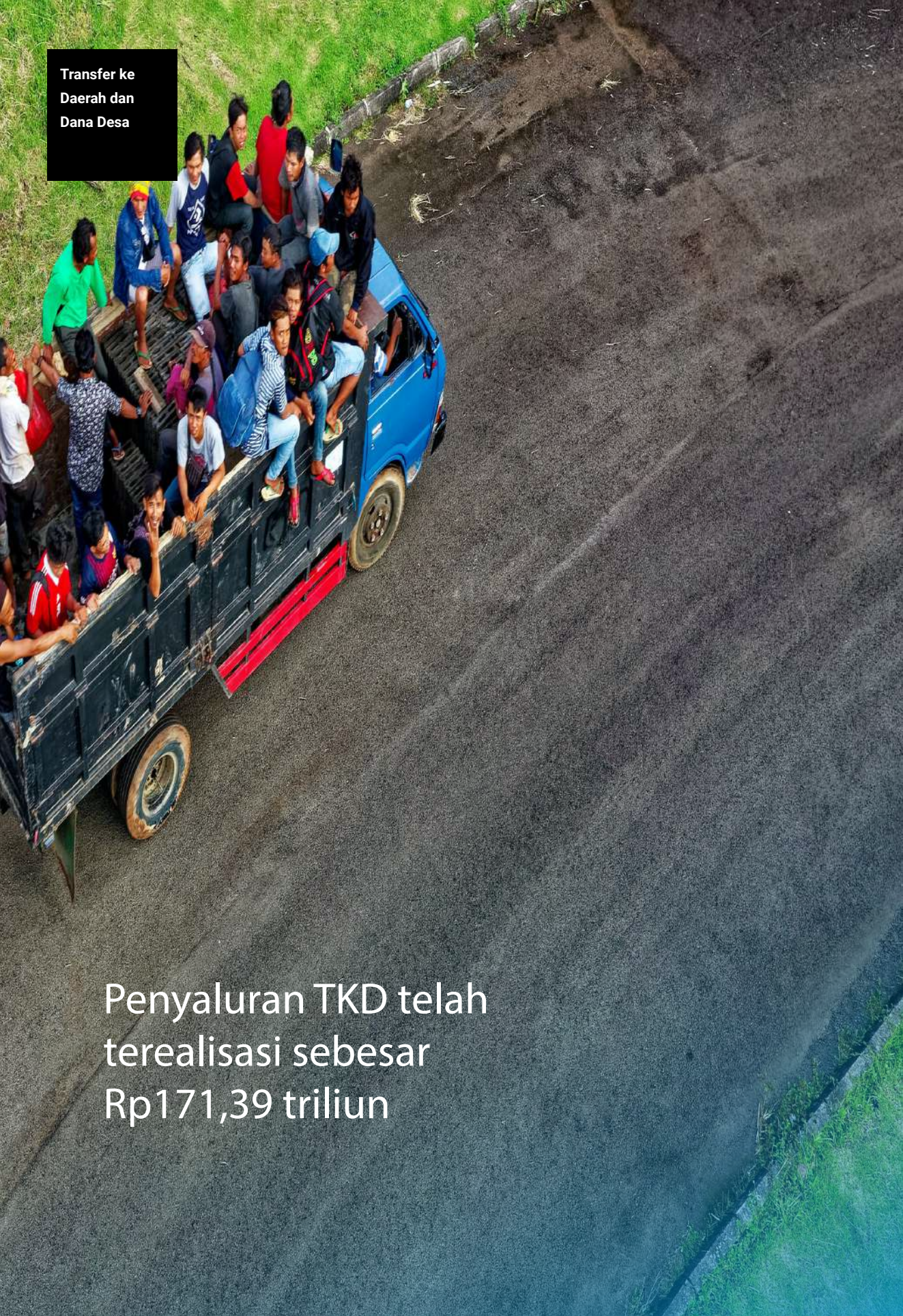

Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Penyaluran TKD telah terealisasi sebesar Rp171,39 triliun

Transfer ke Daerah

Penyaluran TKD telah terealisasi sebesar Rp171,39 triliun atau 21,04 persen dari Pagu. Capaian tersebut mengalami sedikit penurunan sebesar 2,88 persen (*yoy*).

DANA BAGI HASIL

Dana Bagi Hasil telah disalurkan sebesar Rp22,25 triliun atau 16,33 persen dari Pagu. Capaian tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 76,41 persen (*yoy*) karena adanya kenaikan pagu DBH SDA Minerba 2023 sebesar 34 persen (*yoy*), kenaikan pagu DBH SDA Migas 2023 sebesar 19 persen (*yoy*), serta kenaikan pagu DBH CHT 2023 sebesar 36 persen (*yoy*).

DANA ALOKASI UMUM

Realisasi penyaluran DAU pada Maret 2023 telah mencapai Rp104,26 triliun atau 26,33 persen dari Pagu atau mengalami penurunan sebesar 13,87 persen (*yoy*) disebabkan Pemerintah Daerah sedang melakukan penyesuaian penganggaran DAU yang ditentukan penggunaannya

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan menyiapkan laporan rencana penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya sebagai syarat penyaluran sesuai PMK Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan DBH, DAU, dan Dana Otsus.

DANA TRANSFER KHUSUS

Dana Alokasi Khusus Fisik telah terealisasi sebesar Rp170,56 miliar atau 0,32 persen dari Pagu, mengalami kenaikan sebesar 83,82 persen (*yoy*). Hal ini disebabkan adanya peningkatan kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat salur dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penyaluran DAK Fisik, berdasarkan PMK Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan DAK Fisik, paling cepat dilakukan pada bulan Februari setelah Kepala KPPN menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan lengkap dan benar. Dalam rangka percepatan pelaksanaan DAK Fisik 2023, telah dilakukan penyelesaian penyusunan Rencana Kegiatan (RK) oleh Pemda bersama K/L teknis pada akhir Desember 2022. Selain itu, adanya pelaksanaan sosialisasi terkait reviu Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) dalam penyaluran DAK Fisik pada tahun 2021, sehingga APIP lebih memahami tupoksi dalam proses pelaksanaan penyaluran DAK Fisik tahun 2023.

Sementara itu, DAK Non Fisik pada Maret 2023 telah disalurkan sebesar Rp31,32 triliun atau 24,04 persen dari Pagu. Capaian tersebut menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,35 persen (*yoy*). Penurunan tersebut terutama karena turunnya realisasi Dana Tunjangan Guru jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang disebabkan karena terlambatnya rekomendasi penyaluran Dana Tunjangan Guru dari Kemendikbudristek.

DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA

Sampai dengan Maret 2023, Dana Otsus belum terdapat realisasi penyaluran dikarenakan belum ada daerah penerima Dana Otsus yang menyampaikan dokumen syarat salur kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Adapun dokumen syarat salur Dana Otsus Tahap I disampaikan paling lambat akhir Bulan April sesuai PMK Nomor 76/PMK.07/2022.

Sementara itu, Dais telah terealisasi sebesar Rp165,73

miliar atau 11,67 persen. Capaian tersebut menunjukkan adanya penurunan sebesar 16,30 persen (*yoy*) yang dikarenakan adanya kenaikan pagu alokasi Dais Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) TA 2023 dibanding dengan alokasi TA 2022, dimana Dais DIY TA 2023 sebesar Rp1,42 Triliun naik 7,5 persen dibanding TA 2022 sebesar Rp1,32 Triliun.

DANA DESA

Penyaluran Dana Desa pada Maret 2023 telah terealisasi sebesar Rp13,03 triliun atau 18,62 persen dari Pagu. Capaian tersebut menunjukkan adanya kenaikan sebesar 20,89 persen (*yoy*) yang disebabkan telah banyaknya Pemerintah Daerah yang menyampaikan pengajuan persyaratan penyaluran Dana Desa dibandingkan dengan tahun 2022.

Selanjutnya, penggunaan Dana Desa masih diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi di desa berupa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang sampai bulan Maret 2023 telah disalurkan ke rekening kas desa sebesar Rp1,07 triliun kepada 329.227 KPM di 8.849 desa. Selain itu Dana Desa Tahun 2023 ditentukan penggunaannya untuk program ketahanan pangan dan hewani, dana operasional pemerintah desa, program kesehatan termasuk penanganan stunting, serta penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Desa.

INSENTIF FISKAL

Insentif Fiskal (IF) pada Maret telah terealisasi sebesar Rp156,39 miliar atau 1,95 persen dari Pagu. Realisasi tersebut berasal dari penyaluran IF atas Kinerja Tahun Sebelumnya untuk daerah berkinerja baik sebesar Rp3,0 triliun dan untuk daerah tertinggal berkinerja baik sebesar Rp1,0 triliun. Capaian tahun ini lebih rendah sebesar 48,62 persen (*yoy*) yang disebabkan karena Pemerintah Daerah membutuhkan waktu lebih lama dalam menyusun Rencana Kerja (RK) karena alokasi per daerah 2023 lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya secara rata-rata. Selain itu juga terdapat daerah tertinggal yang baru mendapat IF di tahun 2023, sehingga masih membutuhkan penyesuaian dalam penyampaian syarat salurnya. Guna melakukan percepatan atas penyaluran tersebut telah dilakukan komunikasi kepada setiap daerah penerima secara langsung.

Selanjutnya, untuk IF atas Kinerja Tahun Berjalan dengan pagu Rp4 triliun, saat ini belum terdapat realisasi penyaluran

REALISASI TKD TAHUN ANGGARAN 2022 DAN 2023

Uraian	2022		2023		
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
Transfer ke Daerah	804.780,5	176,46	814.718,5	171,39	21,04
1. Dana Bagi Hasil	140.430,4	12,61	136.260,0	22,25	16,33
2. Dana Alokasi Umum	378.000,0	121,04	396.000,0	104,26	26,33
3. Dana Transfer Khusus	189.593,8	31,53	185.797,3	31,53	16,97
a. Dana Alokasi Khusus Fisikw	60.874,0	0,09	53.422,5	0,17	0,32
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	128.719,8	31,43	130.297,3	31,32	24,04
c. Hibah ke Daerah	0,0	0,00	2.077,5	0,03	1,62
4. Dana Otsus	20.436,3	0,00	17.241,3	0,00	0,00
5. Dana Keistimewaan D.I.Y	1.320,0	0,20	1.420,0	0,17	11,67
6. Dana Desa	68.000,0	10,78	70.000,0	13,03	18,62
7. Insentif Fiskal	7.000,0	0,30	8.000,0	0,16	1,95

Tanggal: 1 – 31 Januari 2023
(dalam miliar Rupiah)

dikarenakan masih dalam proses penyiapan dalam penentuan indikator dan pengumpulan data kinerja untuk alokasi IF atas Kinerja Tahun Berjalan tersebut.

Pembiayaan Utang Tahun 2023 Ditargetkan Lebih Efisien Sejalan Dengan Penurunan Defisit dan Pemanfaatan SAL

Pembiayaan Utang

Defisit APBN 2023 telah ditetapkan sebesar 2,84 persen terhadap PDB sebagai langkah konsolidasi fiskal yang terukur. Realisasi pembiayaan utang per akhir Maret 2023 mencapai Rp224,79 triliun atau 32,3 persen dari Target. Pembiayaan utang tahun 2023 ditargetkan lebih efisien sejalan dengan penurunan defisit dan pemanfaatan SAL. Pemenuhan kebutuhan pembiayaan APBN selama bulan Maret 2023 berhasil dilakukan dengan baik dan pemerintah senantiasa mengupayakan pengelolaan pembiayaan utang yang *prudent* dan berkelanjutan dengan risiko terkendali pada level yang aman dan kredibel.

Realisasi Pembiayaan Utang terdiri dari realisasi SBN (Neto) sebesar Rp217,59 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) sebesar Rp7,20 triliun. Dari sisi Pinjaman Dalam Negeri, hingga akhir Maret 2023 mencapai negatif Rp0,36 triliun, terdiri dari realisasi penarikan Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp0,11 triliun dan Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam

Pembiayaan Utang

per 31 Maret 2023

Pembiayaan utang tahun 2023 ditargetkan lebih efisien sejalan dengan penurunan defisit dan pemanfaatan SAL.

Realisasi
Pembiayaan Utang
*dalam triliun Rupiah

Rp **224,79**

Surat Berharga Negara (Neto) *dalam triliun Rupiah	Rp 217,59
Pinjaman (Neto) *dalam triliun Rupiah	Rp 7,2
◆ Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	Rp (0,36)
• Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	Rp 0,11
• Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	Rp (0,47)
◆ Pinjaman Luar Negeri (Neto)	Rp 7,56
• Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	Rp 27,84
• Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri	Rp (20,28)

Negeri sebesar Rp0,47 triliun. Sementara dari sisi Pinjaman Luar Negeri, telah terealisasi sebesar Rp7,56 triliun, terdiri dari Penarikan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp27,84 triliun dan Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp20,28 triliun.

Selama bulan Maret 2023, pemerintah melanjutkan lelang reguler, bergantian antara Surat Utang Negara (SUN) dengan SBSN setiap minggunya, yaitu pada tanggal 7,14, 21, dan 28 Maret 2023. Kinerja lelang SBN pada bulan Maret 2023 mencatatkan *bid to cover ratio* sebesar 2,02x dengan total penawaran yang masuk pada lelang sebesar Rp125,48 triliun. Sementara, rata-rata penawaran yang masuk sepanjang tahun 2023 adalah sebesar Rp37,28 triliun/lelang dengan rata-rata nominal yang dimenangkan sebesar Rp17,02 triliun/lelang. Penerbitan SBN juga dilakukan melalui *private placement* secara terukur, dengan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan dan kondisi kas negara, yaitu penerbitan SUN dalam rangka PPS pada tanggal 27 Maret 2023.

Selanjutnya, sebagai bagian dari pengelolaan portofolio pembiayaan, pemerintah juga telah melakukan lelang pembelian kembali SUN dengan cara penukaran (*debt switch*) dengan mekanisme *Many to Many* pada tanggal 30 Maret 2023. Lelang dilakukan dengan menggunakan fasilitas MOFiDS (*Ministry of Finance Dealing System*) *trading platform* dengan nominal penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang sebesar Rp13,39 triliun. Selain itu, untuk mendukung peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan dan menyediakan alternatif instrumen investasi di masyarakat, pemerintah kembali mengeluarkan SBN Ritel *dual tranches* (dua fitur yang berbeda yang diterbitkan bersamaan) yaitu Sukuk Ritel seri SR018T3 dan SR018T5 yang ditawarkan mulai tanggal 3-29 Maret 2023.

Sampai dengan akhir Maret 2023, posisi utang pemerintah berada di angka Rp7.879,07 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 39,17 persen. Berdasarkan batasan utang yang ditetapkan melalui UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang sebesar 60 persen PDB, utang pemerintah berada di dalam batas aman dan terkendali.

Pemerintah senantiasa melakukan pengelolaan utang secara hati-hati dengan risiko yang terkendali melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo.

Komposisi Utang

***Data per 31 Maret 2023**

Pemerintah melakukan pengelolaan utang secara baik dengan risiko yang terkendali, antara lain melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo

Posisi Utang

*Data per 31 Maret 2023

Rp **7.879,07**

*dalam triliun Rupiah

DEBT **Debt to GDP : 39,17%**

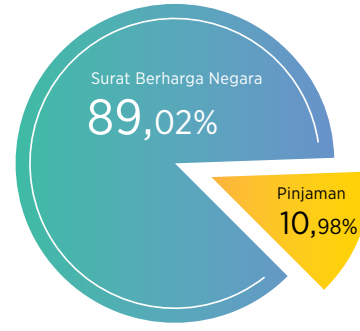

Surat Berharga Negara

Rp 7.013,58

*dalam triliun Rupiah

Domestik	Rp 5.658,77
Surat Utang Negara	Rp 4.600,97
Surat Berharga Syariah Negara	Rp 1.057,80
Valas	Rp 1.354,81
Surat Utang Negara	Rp 1.056,40
Surat Berharga Syariah Negara	Rp 298,42

Pinjaman

Rp 865,48

*dalam triliun Rupiah

Pinjaman DN*	Rp 21,31
Pinjaman LN*	Rp 844,17
Bilateral	Rp 264,69
Multirateral	Rp 527,13
Comercial Banks	Rp 52,35
Suppliers	Rp -

Sejalan dengan kebijakan umum pembiayaan utang untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap, komposisi utang pemerintah didominasi oleh utang domestik yaitu 72,09 persen. Penguatan nilai tukar Rupiah terhadap USD turut berkontribusi menurunkan jumlah nilai utang pemerintah yang beredar per akhir Maret 2023. Sementara berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah mayoritas berupa SBN yang mencapai 89,02 persen. Selain itu, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan tenor menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif. Per akhir Maret 2023, profil jatuh tempo utang Indonesia terbilang cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (*average time maturity*/ATM) di kisaran 8 tahun.

Selanjutnya, guna meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang, pemerintah terus berupaya mendukung terbentuknya pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid. Salah satu strateginya adalah melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk pula pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan (*Green Sukuk*) dan SDG (*SDG Bond*). Peranan transformasi digital dalam proses penerbitan dan marketing SBN yang didukung dengan sistem online juga tak kalah penting, mampu membuat pengadaan utang melalui SBN menjadi semakin efektif dan efisien, serta kredibel.

www.kemenkeu.go.id/apbnkita